

MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Pengantar Teoritis dan Praktis

Dr. Muhammad Nasir, M.Ag
Muhammad Khairul Rijal, M.Pd



CV. Bo' Kampong Publishing (BKP)

Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Pengantar Teoritis dan Praktis

Penulis:

Dr. Muhammad Nasir, M.Ag
Muhammad Khairul Rijal, M.Pd

Editor:

Fulan Puspita, M.Pd.I

Desain Cover:

Mochamad Fitriansyah

Penerbit:

CV. Bo' Kampong Publishing (BKP)

Jl. Harun Nafsi, Gg. Langgar, Rt. 18,
Rapak Dalam, 75133
Loa Janan Ilir, Samarinda
bokampongpublishing@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Cetakan Kedua, Juni 2021

vii, 150; 16 x 25 cm

ISBN: 978-623-94055-4-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT buku berjudul “ Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam” ini bisa hadir di tengah-tengah para pembaca sebagai penambah khazanah bacaan para pegiat pendidikan. Iringan sholawat dan taslim selalu tercurah limpahkan kepada junjungan yang mulia, guru terbaik ummat yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua.

Dengan membaca buku ini, diharapkan para pembaca mampu memahami baik secara teoritis maupun praktis proses dalam manajemen kurikulum. Buku ini mencoba untuk menghadirkan konsep manajemen kurikulum pendidikan Islam yang dikolaborasikan dengan konsep manajemen kurikulum kontemporer dan menyesuaikan dengan sistem pendidikan di Indonesia sehingga diharapkan tidak menghilangkan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga akhirnya buku ini bisa hadir di tengah-tengah para pembaca.

Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Tiada harapan lain kecuali masukan serta saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Manajemen Kurikulum.....	1
B. Manajemen Kurikulum Dalam Perspektif Islam	6
C. Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam.....	10
D. Prinsip, Dan Fungsi Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam.....	15
E. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam.....	19

BAB II PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam.....	22
B. Pokok Bahasan Dalam Perencanaan Kurikulum	25
C. Unsur Yang Terlibat Dalam Perencanaan Kurikulum.....	29
D. Fungsi Dan Tujuan Perencanaan Kurikulum.....	31
E. Karakteristik Perencanaan Kurikulum	33
F. Landasan Perencanaan Kurikulum.....	34

G. Model Perencanaan Kurikulum	37
---	-----------

BAB III ORGANISASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian organisasi Kurikulum Pendidikan Islam	39
B. Unsur- Unsur Organisasi Kurikulum	42
C. Faktor-faktor dalam Organisasi Kurikulum	43
D. Prosedur Mereorganisasi Kurikulum	46
E. Model-model Organisasi Kurikulum.....	48

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGONTROLAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Implementasi Kurikulum Pendidikan Islam	56
B. Implementasi Kurikulum Tingkat Sekolah	59
C. Implementasi Kurikulum Tingkat Kelas/ Mata Pelajaran.....	60
D. Prinsip-Prinsip Implementasi Kurikulum	61
E. Model-Model Implementasi Kurikulum dan Pembelajaran	64
F. Pengontrolan Kurikulum Pendidikan Islam	66

BAB V EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Evaluasi Kurikulum	68
B. Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Kurikulum	73
C. Proses Evaluasi Kurikulum	75
D. Prinsip Evaluasi Kurikulum.....	80
E. Model-Model Evaluasi Kurikulum	82

**BAB VI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN
ISLAM**

- A. Pengertian Pengembangan Kurikulum 88**
- B. Peluang Pengembangan Kurikulum..... 92**
- C. Kebijakan Pembaharuan Kurikulum..... 94**
- D. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum 99**
- E. Pihak – Pihak Yang Terlibat dalam Proses
Pengembangan Kurikulum 104**
- F. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 110**
- G. Pendekatan Pengembangan Kurikulum 123**

BAB VII INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

- A. Inovasi Pendidikan..... 128**
- B. Pengertian Inovasi Kurikulum Pendidikan
Islam..... 130**
- C. Proses Inovasi Kurikulum..... 134**
- D. Proses Keputusan Inovasi 138**

DAFTAR PUSTAKA 140

TENTANG PENULIS 148

BAB I

KONSEP DASAR MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Manajemen Kurikulum

Sebelum mendefinisikan apa itu manajemen kurikulum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi manajemen dan definisi kurikulum. Definisi manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut *Katz* “*The management as exercising direction of a group or organization through executive, administrative, and supervisory positions*”¹ *Katz* mendefinisikan manajemen sebagai mengarahkan pelaksanaan kepada kelompok atau organisasi melalui posisi eksekutif, administrasi, dan pengawasan.
- 2) *Northouse* mendefinisikan manajemen :” *The management as a process by which definite set objectives are achieved through the efficient use of resources*”.² Artinya “Manajemen sebagai proses dimana tujuan yang ditetapkan dicapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien”
- 3) Menurut *Terry* manajemen merupakan proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk

¹.Katz, R. L. “*Skills of an effective administrator*”,(Harvard Business Review, 1955). 33(1), 33-42.

².Northouse, P. “*Leadership theory and practice*”. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications,2007).

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³

- 4) "*Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading and controlling organizational resources*" Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi.⁴
- 5) Pengertian manajemen menurut *Johnson* adalah "proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan". Yang dimaksud sumber-sumber disini adalah mencakup orang-orang, alat, media, barang, uang dan sarana yang akan diserahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka penyelesaian tujuan.⁵
- 6) Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁶
- 7) Menurut *Stoner* manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya

³.U.Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 1

⁴ Richard L. Daft, "*Management.*" (New Jersey: Prentice Hall .2010)., h.5.

⁵.Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.4

⁶.Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Kartika: Surabaya, 1997),h 358

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan bersama melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan kurikulum itu sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Kata kurikulum diambil dari bahasa Latin yaitu *curere*, yang artinya lintasan perlombaan lari. Dimana dalam lintasan lari ada garis *start* dan ada garis *finish*. Dalam dunia pendidikan diartikan bahwa bahan belajar ada awal dan ada akhirnya.⁸
- 2) Pada Tahun 1956, *Ralph W Tyler* mendefinisikan kurikulum sebagai "*All of the learning of the students which is planned by and directed by the school to attain educational goals.*" Artinya "Semua pembelajaran siswa yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan".⁹
- 3) Menurut *Ornstein dan Hunkins* " Kurikulum adalah seluruh pengalaman murid yang didapat dari gurunya".¹⁰
- 4) Kurikulum adalah jembatan yang sangat vital

⁷.S.Shimatul Ula, *Manajemen Pendidikan Efektif*, (Jogjakarta: Berlian 2013), h. 9

⁸.Dakir,*Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*,(Jakarta: Bum Aksara, 2010),h.2.

⁹.Ralph W. Tyler,"*Curriculum: Then and Now*," in Proceedings of the 1956 Invitational Conference on Testing Problems (Princeton, N.J.: Educational Testing Service, 1957), h. 79.

¹⁰.Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins,"*Curriculum Foundations, Principles, and Issues*" (New Jersey ; Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1978). h.6.

untuk mencapai titik akhir suatu perjalanan yang ditandai dengan mendapatkan ijazah.¹¹

- 5) Kurikulum adalah rencana pelajaran.¹²
- 6) Di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dijelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

Dalam perkembangannya kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan, yang memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran disekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat.
- 2) Kurikulum bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum berarti semua pengalaman, kegiatan dan pengetahuan siswa dibawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah, bahwa semua kegiatan yang dilakukan siswa dapat

¹¹.Oemar Hamalik, " *Kurikulum dan Pembelajaran*"(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h 16

¹².S. Nasution, " *Asas-Asas Kurikulum*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h 2

¹³.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, No. 19.

memberikan pengalaman belajar.¹⁴

Setelah mengetahui pengertian dari manajemen dan kurikulum, mari kita bahas pengertian manajemen kurikulum. Banyak definisi yang diutarakan oleh ahli pendidikan. Berikut ini beberapa definisi dari manajemen kurikulum oleh para ahli:

- 1) Manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.¹⁵
- 2) Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.¹⁶
- 3) Menurut *Mulyasa*, manajemen kurikulum adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.¹⁷

Dari beberapa pengertian manajemen kurikulum diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan proses pendayagunaan semua unsur manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kurikulum secara kooperatif,

¹⁴.Abdul Manab, *Manajemen Perubahan Kurikulum*, (Jogjakarta: Kalimedia 2014), h.5

¹⁵.Syafaruddin dan Amiruddin, *Manajemen Kurikulum*,(Medan: Perdana Publishing,2017) h 39

¹⁶.Rusman, "*Manajemen Kurikulum*" (Jakarta: Rajawali Press,2009) h.3.

¹⁷.E.Mulyasa,"*Manajemen Berbasis Sekolah,Konsep,Strategi,dan Implementasi*"(Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), h.40

komperhensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

B. Manajemen Kurikulum Dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa pembinaan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran mengenai manusia itu sendiri. Dengan demikian Islam berarti memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumber daya manusia. Konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman.¹⁸ Salah satu upaya di dalam melakukan proses pembinaan sumber daya manusia yaitu melalui kurikulum pendidikan yang dikelola dengan baik melalui sebuah proses manajemen yang disebut dengan manajemen kurikulum. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi manajemen kurikulum dalam perspektif Islam kita dapat melihatnya dari sejarah perkembangan Islam yang berpengaruh terhadap sejarah pendidikan Islam.

Sejarah pendidikan Islam terbagi kedalam empat periode¹⁹, yaitu:

- 1) periode pembinaan, dimulai sejak kelahiran Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama sampai akhir masa kekuasaan Bani Umayyah (610-750);
- 2) periode keemasan, dimulai dari lahirnya Bani

¹⁸.Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 17.

¹⁹.Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.46

- Abbasiyyah sampai jatuhnya Baghdad dengan kedatangan Mongol (750-1258M);
- 3) periode kejatuhan dan kemunduran, dimulai dengan Imperium Turki Usmani hingga kemerdekaan Negara-negara Islam (125-1800M);
 - 4) periode pembaharuan dan pembinaan kembali, dari kemerdekaan negara-negara Islam dan Imperium Turki Usmani hingga sekarang (1800-sekarang).

Setiap periode diatas memiliki coraknya tersendiri. Dan salah satu indikator kemapanan sistem pendidikan Islam ditandai dengan lahirnya madrasah pada periode keemasan. Pendidikan Islam senantiasa bertransformasi dari awalnya pendidikan diadakan di rumah-rumah sampai kepada *kuttab* dan masjid-masjid. Manajemen kurikulum *kuttab* masih bersifat sederhana yang berupa tulis-baca, hafalan Alquran, dan pokok-pokok ajaran Islam. Pada masa pemerintahan *Umar Ibn al-Khattab*, muncul ide pembaharuan *kuttab*. *Umar* mengintruksikan agar anak-anak di *kuttab* diberikan materi pelajaran berenang, mengendarai kuda, memanah, dan tata bahasa Arab. Akan tetapi,Instruksi *Umar* tidak semua dilaksanakan pada tiap *kuttab* karena pada tiap *kuttab* situasinya berbeda. Berenang misalnya, hanya dapat dilaksanakan pada *kuttab* yang tempatnya berada ditepi sungai, seperti *kuttab* di Irak dan Mesir.²⁰

²⁰.Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam....* h.7-8

Sedangkan manajemen kurikulum yang dikembangkan madrasah pada awalnya, hanya meliputi ilmu-ilmu agama, dengan hukum Islam (*fiqh*) dan teologi Islam (*kalam*) sebagai studi pokoknya. Seiring dengan kemajuan peradaban Islam, di madrasah kemudian dikembangkan pula kajian tentang ilmu-ilmu rasional, seperti berhitung, sejarah sastra, dan lain-lain. Selanjutnya manajemen kurikulum dapat dikategorikan menjadi ilmu-ilmu agama; seperti *fiqh*, *kalam*, sastra Arab, dan lain-lain. Ilmu-ilmu rasional seperti ilmu-ilmu kealaman yang meliputi filsafat, matematika dan kedokteran.²¹ Madrasah merupakan titik awal dari kebangkitan dan kemapanan sistem pendidikan Islam. Tetapi, karena lembaga-lembaga pendidikan Islam pendahulunya (*kuttab*, *masjid*) dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan umat Muslim, maka kelahiran madrasah agaknya menjadi keharusan historis demi terwujudnya sistem kelembagaan pendidikan Islam yang profesional. Manajemen kurikulum dan metode pendidikan Islam (Tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran, terdapat dua metode pengajaran di madrasah, yakni debat tertulis (*ta'liqah*) dan debat lisan)²² yang ada di dalamnya dikembangkan dan disesuaikan agar dapat ikut berperan bagi kemajuan peradaban Islam. Madrasah abad pertengahan sesungguhnya merupakan sistem kelembagaan pendidikan Islam yang lengkap (*fulfill education system*). Dari madrasah pula kemudian

²¹.Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam...* h.16

²².Charles Stanton, "*Higher learning in Islam: The Classical Period*", AD 700-1300, (Maryland: Rowman & Littlefield, 1990).

dikembangkan konsep *al-jami'ah* seperti yang sekarang dikenal dengan universitas.²³

Aplikasi pendidikan Islam pada universitas Islam abad pertengahan tersebut bertalian erat dengan tujuan filosofi pendidikan Islam. Tujuan universitas Islam (*al-jami'ah*) dirumuskan sesuai dengan tujuan filosofis pendidikan Islam, yakni membentuk manusia Muslim yang taat beribadah kepada Allah Swt. Secara total, sekaligus dapat memakmurkan serta mendayagunakan sumber daya alam yang dilimpahkan Allah Swt bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Dari tujuan ideal tampak bahwa dalam tujuan pendidikan universitas Islam berupaya mengintegrasikan aspek moral-spiritual dan fisik-material. Unsur integral tersebut menjadi karakteristik pokok pendirian universitas Islam.²⁴ Dalam upaya merealisasikan tujuan filosofis pendidikan Islam, universitas (*al-jami'ah*) di atas, manajemen kurikulum universitas Islam disusun dalam dua bentuk, yakni manajemen kurikulum keagamaan dan manajemen kurikulum keilmuan. Klasifikasi manajemen kurikulum ke dalam dua bidang pokok ini merupakan pengaruh dari pola klasifikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun seperti tertera dalam bukunya *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Manajemen kurikulum bersifat keagamaan terdiri dari; Ilmu Nahwu, Ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, *Kitabah*, 'Arudh, dan Ilmu Sejarah. Sedangkan manajemen kurikulum yang bersifat keilmuan terdiri dari: Metafisika, Filsafat,

²³.Hasan Asari, "Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-Lembaga Pendidikan", (Bandung: Mizan, 1994), h.45

²⁴.Muhammad Azhari: Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, dalam *Jurnal Analytica Islamica*: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017

Kedokteran, Musik, dan lain-lain. Dengan manajemen kurikulum seperti itu, sejumlah metode pembelajaran yang digunakan di universitas Islam untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, antara lain: metode ceramah (*muhadarah*), disputasi (*munazarah*), korepondensi (murasalah), dan *licentia educando* (*al-ijazah*).²⁵

Dapat disimpulkan bahwa Islam sudah mempraktekkan proses manajemen kurikulum dan memiliki coraknya tersendiri dalam setiap periode perkembangannya yang berpengaruh terhadap sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam senantiasa bertransformasi dari awalnya pendidikan diadakan di rumah-rumah sampai kepada *kuttab* dan masjid-masjid, madrasah, sampai *al-jamiah*. Hal ini disebabkan karena Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh dan komprehensif mengenai pembinaan sumber daya manusia dimana konsep ini tetap aktual dan relevan untuk diaplikasikan sepanjang zaman.

C. Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

- a) Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.²⁶
- b) Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya (*kaffah*),

²⁵.Abdullah Idi dan Toto Suharto, "*Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.40

²⁶.Zakiah Dradjat, "*Ilmu Pendidikan Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 28

mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.²⁷

- c) Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.²⁸
- d) Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Dan adapun tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis).²⁹
- e) Pendidikan Islam adalah suatu proses

²⁷.Hasan Baharun, "*Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*", (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2017), hal. 88

²⁸.Omar Mohammad At-toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang 1979, hal. 399

²⁹.Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal *Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 2, Desember 2013, 164

mempersiapkan generasi penerus untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Pendidikan Islam dalam pengertian di atas merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai *kholifah* di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁰

- f) Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.³¹

Adapun tujuan dari pendidikan Islam menurut *Sayid Sabiq* yaitu mendidik jiwa seseorang agar dapat terdidik secara sempurna, serta dapat menunaikan kewajiban-kewajiban karena Allah SWT, dan senantiasa berusaha untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dapat berkata

³⁰.Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980, hal.94.

³¹.Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010, hal. 29

jujur, berpihak kepada yang benar, serta berkeinginan untuk mengembangkan benih-benih kebahagiaan pada manusia.³²

2. Pengertian Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Sebagaimana telah dibahas diatas, tentang pengertian manajemen kurikulum dan pengertian pendidikan Islam, maka dapat kita simpulkan pengertian dari manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah sebuah proses pendayagunaan semua unsur manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi kurikulum secara kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum pendidikan Islam yaitu mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus, yang kesemuanya bermuara pada 'akhlak mulia'. Secara lebih rinci ciri kurikulum pendidikan yang berlandaskan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menonjolkan tujuan agama dan akhlaqul karimah, baik dalam tujuan pengajaran, materi dan gerak pelaksanaannya.
- 2) Kandungan materi pendidikan mencakup aspek jasmaniah, intelektual, psikologi, dan spiritual.

³².Sayyid Saabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 1981), hal. 52.

- 3) Adanya keseimbangan antara ilmu syariah dengan ilmu-ilmu aqliyah;
- 4) Tidak mengesampingkan bakat dan apresiasi seni, tetapi juga tidak menghalangi perkembangan akhlak;
- 5) Adanya pertimbangan terhadap kondisi psikologis peserta didik.³³

Sedangkan menurut *Mujamil Qomar* Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan tekniknya;
- 2) Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam;
- 3) Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. Maksudnya ialah aspek pribadi siswa tepat pada sasaran terutama aspek pribadi siswa yaitu jasmani, akal, dan rohani;
- 4) Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan;
- 5) Keterkaitan kurikulum dengan kesediaan, minat,

³³.Chatib Thaha. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, h.9

kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.³⁴

D. Prinsip, Dan Fungsi Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

1. Prinsip Manajemen Kurikulum

Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam manajemen kurikulum yang baik, diantaranya:

- a) Produktivitas, artinya berorientasi pada hasil yang dicapai, yaitu peserta didik mampu mencapai hasil belajar sesuai tujuan kurikulum;
- b) Demokratisasi, yaitu menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya untuk mencapai tujuan kurikulum;
- c) Kooperatif, yaitu kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat;
- d) Efektifitas dan efisiensi, artinya mampu mencapai hasil maksimal dengan biaya, tenaga, dan waktu yang singkat;
- e) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.³⁵

Menurut *Mulyasa* Prinsip-prinsip kurikulum bermutu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

³⁴.Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam)*, (Malang: Erlangga, 2007), h 151.

³⁵.Wina Sanjaya, *"Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktek KTSP"*,(Jakarta: Kencana,2009), h. 128

- a) Keimanan, yaitu nilai-nilai budaya, budi pekerti yang perlu digali ,dipahami,dan diamalkan untuk mewujudkan karakter dan martabat bangsa;
- b) Integritas Nasional, yaitu usaha dan proses dalam menyatukan perbedaan yang ada pada suatu lembaga pendidikan agar tercipta keserasian dan keselarasan;
- c) Keseimbangan etika,logika,estetika,kinestetika;
- d) Perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi;
- e) Pengembangan kecakapan hidup yang mencakupi: keterampilan berfikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional;
- f) Belajar sepanjang hayat;
- g) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan;
- h) Relevan dengan kebutuhan kehidupan.³⁶

Prinsip Manajemen Kurikulum menurut *Bryan Independent School District* yaitu:

- 1) Pengembangan kurikulum bersifat dinamis dan mencakup proses pengelolaan, pengembangan, dan penyampaian kurikulum;
- 2) Pengembangan kurikulum mencerminkan

³⁶.Djuwarijah,” Strategi Peningkatan Manajemen Kurikulum dalam pengembangan Mutu SDM Menuju Terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Berwawasan Internasional, h 205, *Jurnal El-Tarbawi Vol 1, No. 2, 2008*.

pemahaman terbaik tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam masyarakat yang berubah, kebutuhan masyarakat, praktik berbasis penelitian, undang-undang negara, dan persyaratan Dewan Pendidikan Negara Bagian;

- 3) Standar dan harapan siswa, dan menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan serangkaian inti tujuan / harapan pelajar yang tidak dapat diukur dan terukur yang disesuaikan secara vertikal dan horizontal. Hasilnya adalah ruang lingkup dan dokumen urutan yang terartikel dengan baik untuk semua area konten dan tingkat kelas yang memandu keputusan tentang pengajaran dan pembelajaran;
- 4) Dokumen kurikulum disesuaikan dan mudah diakses;
- 5) Kurikulum dinilai dengan penilaian formatif dan sumatif di tingkat kampus, kelas, dan individu.³⁷

2. Adapun fungsi manajemen kurikulum menurut *Dinn Wahyudin* diantaranya:

- a) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum;
- b) Meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal;
- c) Meningkatkan relevansi dan efektivitas

³⁷.Tommy Wallis and Teresa Voltz, *Curriculum Management Plan*, (North Texas Avenue: Bryan Independent School District, may 2015), h.6

- pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik;
- d) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran;
 - e) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar;
 - f) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan.³⁸

Sedangkan dalam Pendidikan Islam terdapat beberapa prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu:

- 1) Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya.
- 2) Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- 3) Keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- 4) Ada pertautan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar.
- 5) Pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya serta memelihara perbedaan di antara alam sekitar dan masyarakat.
- 6) Prinsip perkembangan dan perubahan.
- 7) Prinsip pertautan antarmata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung

³⁸.Dinn Wahyudin, "*Manajemen Kurikulum*", (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h. 20

dalam kurikulum.³⁹

E. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Secara umum manajemen kurikulum memiliki Ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum tidak terkecuali dalam manajemen kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan agama dan pendidikan nasional, keberlangsungannya di jamin oleh Undang-Undang. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 mendefinisikan Pendidikan agama sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Adapun fungsinya untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.⁴⁰ Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan

³⁹. Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam)*, (Malang: Erlangga, 2007), h.152.

⁴⁰.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II, Pasal 2 ayat (1).

penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁴¹ Pemerintah mewajibkan seluruh satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama. Adapun pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri Agama. Kurikulum pendidikan agama harus mengacu dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pada tingkat satuan pendidikan, ruang lingkup manajemen kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/ kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang tidak terpisah dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah.⁴² Manajemen kurikulum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan manajemen berbasis sekolah (MBS).⁴³

Secara teknis alur manajemen kurikulum terbagi dalam empat tahap berikut:

- 1) Perencanaan, meliputi: Analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum dan membuat rencana induk (*master plan*) berupa pengembangan, pelaksanaan dan penilaian.
- 2) Pengembangan, meliputi: Perumusan rasional atau dasar pemikiran, Perumusan visi, misi dan

⁴¹.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II, Pasal 2 ayat (2).

⁴².Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) h.20-21.

⁴³.Rusman, *Manajemen kurikulum* (Yogyakarta: Deepublish, 2011), h 77

- tujuan, Penentuan struktur dan isi program, Pemilihan dan pengorganisasian materi, Pengorganisasian kegiatan pembelajaran, Pemilihan sumber, alat dan sarana belajar dan Penentuan cara mengukur hasil belajar.
- 3) Pelaksanaan, meliputi: Penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran), Penjabaran materi (kedalaman dan keluasan), Penentuan strategi dan metode pembelajaran, Penyediaan sumber, alat dan saran pembelajaran, Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, Setting lingkungan pembelajaran.⁴⁴
 - 4) Tahap evaluasi: KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁴⁵

⁴⁴.Dinn Wahyudin,*Manajemen Kurikulum*,...h 13

⁴⁵.Rena Lestari, *Siklus manajemen* (Yogyakarta:DeePublis,2006),

BAB II

PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Perencanaan Kurikulum Pendidikan Islam

Berikut ini beberapa pengertian perencanaan, diantaranya:

- 1) Perencanaan adalah penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat.⁴⁶
- 2) Menurut Susan Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁴⁷
- 3) Menurut *kauffman* dalam *Purwanto* dalam *Hermino*⁴⁸ perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk seefisien dan seefektif mungkin.
- 4) Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang

⁴⁶.St. Vembriarto, "Pengantar Perencanaan Pendidikan", (Jakarta: Grasindo, 1993), h 28.

⁴⁷.Susan Albers Mohrman, et.al., School Based Management: Organizing for High Performance, (San Francisco: Mc Gill Publishing, 1994), h.81.

⁴⁸.Hermino, Agustinus., *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter*. (Bandung: Alfabeta, 2014) h 38

hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁹

- 5) Menurut *Usman* perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan.⁵⁰

Sedangkan pengertian perencanaan kurikulum diutarakan oleh banyak ahli diantaranya:

- 1) Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan. Kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Kurikulum adalah semua pengalaman yang mencakup yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan.⁵¹
- 2) Perencanaan pendidikan menurut *Engkoswara* dan *A. Komariah* yaitu kegiatan mengambil keputusan dan menetapkannya yang mana keputusan tersebut berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, pemberdayaan sumber-sumber, pemilihan metode secara tepat agar pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dapat

⁴⁹.Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1992), h.50.

⁵⁰.Husaini Usman, "Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan" (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 66.

⁵¹.Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2008), h.152.

berjalan efektif, efisien, dan mutunya terjamin.⁵²

- 3) Sedangkan Pengertian perencanaan kurikulum menurut *Rusman* adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina anak didik kearah perubahan prilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada anak didik.⁵³
- 4) Perencanaan kurikulum yaitu suatu alat atau acuan yang menuntun tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan, media yang akan dipakai, tindakan yang harus dilakukan, alokasi biaya, tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sistem pengawasan dan monitoring, serta peran seluruh unsur ketenagaan didalam mencapai tujuan lembaga pendidikan.⁵⁴
- 5) *Beane James* mendefinisikan perencanaan kurikulum sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai unsur peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan, situasi pembelajaran, penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.⁵⁵

Dari beberapa pengertian diatas tentang perencanaan dan perencanaan kurikulum, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum pendidikan Islam yaitu sebuah analisis yang bersifat rasional dan sistematis yang disusun

⁵².Engkoswara dan A. Komariah, "Administrasi Pendidikan" (Bandung: Al-fabeta, 2010),h 132.

⁵³.Rusman, "Manajemen Kurikulum" (Jakarta: Rajawali Press,2009), h 21.

⁵⁴.Hamalik, "Kurikulum dan Pembelajaran", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),h 152.

⁵⁵.Beane, James A et all, Curriculum Planning and Development, (Boston: Allyn and Bacon,1986), hal. 32

untuk menjadi acuan terkait sumber daya manusia yang dibutuhkan, media yang akan dipakai, tindakan yang harus dilakukan, alokasi biaya, tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sistem pengawasan dan monitoring, serta peran seluruh unsur ketenagaan didalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

B. Pokok Bahasan Dalam Perencanaan Kurikulum

Perencanaan dirancang diawal sebelum kita melaksanakan langkah-langkah manajemen lainnya. Perencanaan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat di dalam perencanaan ada proses penentuan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya.

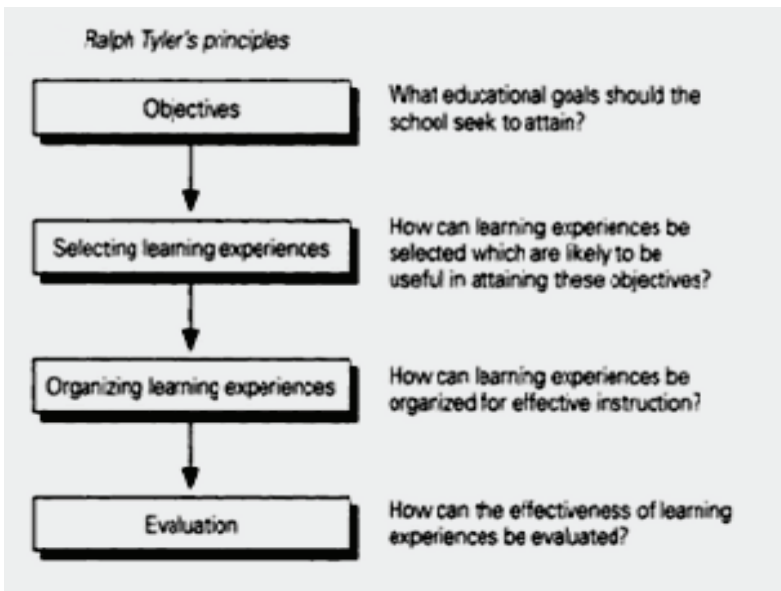
Ada beberapa pokok pembahasan dalam perencanaan, yaitu:

- 1) Tujuan apa yang dicapai dengan perencanaan itu;
- 2) Status sistem pendidikan yang ada dan bagaimana keadaannya sekarang;
- 3) kemungkinan-kemungkinan pilihan apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan;
- 4) strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Ralph Tyler menyatakan bagaimana kurikulum seharusnya dibangun. *“Tyler’s model states how to build a curriculum. He argues that there are really four principles or big questions that curriculum makers have to ask. These questions are concerned with selecting objectives, selecting learning experiences, organizing learning experiences and evaluating. For Tyler, these questions can be answered systematically, but only if*

there are posed in this order, for answers to all latter questions logically presuppose answers to all prior questions". Dia berpendapat bahwa sebenarnya ada empat prinsip atau pertanyaan besar yang harus diajukan oleh pembuat kurikulum. pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan pemilihan tujuan, pemilihan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar dan evaluasi.⁵⁶ Lihat gambar berikut ini:

Gambar 1. Ralph Tyler's Principles



Perencanaan kurikulum sangat tergantung pada pengembangan kurikulum dan tujuan kurikulum yang akan menjadi penghubung teori-teori pendidikan yang

⁵⁶.Collin J.Marsh, *Planning,Management and Ideology: Key concepts for understanding curriculum*, (London: Falmer Press,1997),h 119-120

digunakan.⁵⁷ Parkey menegaskan bahwa tujuan yang direncanakan dari kurikulum dikembangkan melalui berbagai perspektif, teori dan penelitian yang didasarkan pada kekuatan sosial, pengembangan manusia dan pembelajaran serta model pembelajaran.⁵⁸ Perencanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan professional dengan menganalisa dan memperhatikan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan kurikulum diantaranya yaitu:

1) Kondisi sosiokultural

Yaitu dengan memperhatikan serta memanfaatkan narasumber yang ada dimasyarakat seperti para ahli psikologi pendidikan, pakar sosiologi, pemerhati anak, dan lain-lain. hal ini dikarenakan pendidikan adalah kegiatan behavior dimana terjadi proses interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan.

2) Ketersediaan fasilitas

Perlu pendekatan “*bottom up*” yaitu melibatkan guru karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah para guru serta dengan tetap memperhatikan kesiapan fasilitas di lapangan.⁵⁹

Perencanaan kurikulum menyangkut banyak dimensi. *Eisner* menjelaskan bahwa ada beberapa unsur penting dari dimensi perencanaan kurikulum. Unsur tersebut yang akan menentukan logika dan karakteristik

⁵⁷.Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.21.

⁵⁸.Parkey F W, *Curriculum Planning a Contemporary Approach*, (New York: Person, 2006),hal. 4

⁵⁹.Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2010),h 151

alur dari sebuah perencanaan kurikulum.⁶⁰ Unsur tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan prioritas;
- 2) Isi kurikulum;
- 3) Jenis pembelajaran;
- 4) Organisasi pembelajaran;
- 5) Organisasi isi;
- 6) Model presentasi dan respon;
- 7) Jenis evaluasi.

Perencanaan kurikulum merupakan proses yang melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis dan seleksi informasi yang relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses perencanaan ada hubungan tiga kegiatan perencanaan yang berurutan, yaitu: menilai situasi dan kondisi saat ini, merumuskan dan menetapkan situasi dan kondisi yang diinginkan, dan menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan.⁶¹

Adapun perencanaan kurikulum pendidikan Islam mensyaratkan adanya muatan materi kurikulum yang memiliki jangkauan yang lebih jauh yaitu tidak hanya membekali siswa dengan seperangkat kompetensi akademik saja melainkan dengan kompetensi lainnya, tetapi juga muatan mata pelajaran yang membekali

⁶⁰.Eisner E W, *The Education Imagination on the Design and Evaluation of School Program*,(Ohio: Meril Prentice, 2002), hal. 133-153

⁶¹.Abdul Manab, *Manajemen Perubahan Kurikulum*,(Yogyakarta: Kalimedia, 2014), hal. 222

siswa untuk siap dalam menghadapi kehidupan yang lebih abadi/ kekal yaitu menghadap kehadiran Allah SWT. Sehingga jangkauan perencanaan kurikulumnya tidak hanya berbunyi dunia kerja, tetapi juga dunia akhirat.⁶²

C. Unsur Yang Terlibat Dalam Perencanaan Kurikulum

Menurut Oemar Hamalik, perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan.⁶³ Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu pada level sekolah yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan dan mengadaptasi kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.⁶⁴

Perencanaan kurikulum melibatkan semua pihak baik guru, supervisor, administrator dan lainnya. Kepala sekolah sebagai *top management* di sekolah mempunyai

⁶².Dedi Lazwardi , Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* Vol . 7 No. 1, Juni 2017

⁶³.Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2008), 152.

⁶⁴.Sudarsono, Upaya Manajerial Pengembangan Kurikulum Program Unggulan di Madrasah Aliyah,dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam,volume 4 Nomor 1, Mei 2016,h 94.

tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, guru dan kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan.⁶⁵ Namun yang perlu diperhatikan, semua guru harus dilibatkan dalam perencanaan kurikulum tingkat kelas. Bahkan pada tingkat (wilayah/daerah/distrik), ditingkat nasional harus ada representasi guru. Level perencanaan kurikulum menurut *Oliva*⁶⁶ dimulai dari level kelas, kemudian *individual school, school district, state, region, nation* dan *world*. Dalam pendekatan yang sifatnya “*administrative approach*” maka pihak atasan yang merencanakan kurikulum kemudian disampaikan ke instansi dibawahnya hingga ke guru. Guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya karena memiliki peran pasif dan hanya sebagai pelaksana lapangan. Namun,ada juga pendekatan yang dimulai dari bawah dimana perencanaan dan perubahan kurikulum bersumber dari guru atau kepala sekolah dimana mereka terinspirasi oleh ide baru terkait kurikulum dan ingin menerapkannya untuk meningkatkan mutu pelajaran di sekolah mereka inilah yang disebut dengan pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*”. *J.G Owen* sangat menekankan perlunya keterlibatan guru dalam perencanaan kurikulum. Guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan yang sudah disusun bersama.⁶⁷ Di Inggris gagasan ini berwujud dalam bentuk “*teacher’s centeres*” yang dibentuk secara lokal sebagai tempat guru-guru

⁶⁵.Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 107.

⁶⁶.Oliva, P. F, “*Developing the Curriculum*”, (Amerika: Harpers Collin Publisher, ,1992),h 58.

⁶⁷.Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2010),h 150-151

bertemu dan berdiskusi tentang pembaharuan pendidikan. Disamping guru-guru berkumpul juga pengajar dari perguruan tinggi, pengusaha dan para konsumen lulusan sekolah.

D. Fungsi Dan Tujuan Perencanaan Kurikulum

Didalam merancang kurikulum perlu perencanaan yang matang, dengan ketelitian dan kecermatan serta bersifat universal. Karena perencanaan kurikulum memiliki banyak fungsi diantaranya:

- 1) Berfungsi sebagai acuan dan memberi arahan tentang berbagai sumber daya yang diperlukan di dalam pembelajaran, seperti media yang digunakan, aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan lain-lain;
- 2) Berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan yang berakar dari tujuan pendidikan nasional;
- 3) Memiliki fungsi dan sifat adaptif artinya mampu dan mudah menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan serta perkembangan yang terjadi disekitarnya;
- 4) Mengedepankan efektivitas dalam mencapai tujuan yang maksimal dan optimal serta efisiensi didalam penggunaan sumber daya yang tersedia.⁶⁸

Selain itu menurut Oemar Hamalik perencanaan

⁶⁸.Arif Munandar, " *Pengantar Kurikulum*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018),h 107

kurikulum memiliki fungsi sebagai berikut⁶⁹:

- 1) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaianya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, system control dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.
- 2) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang, besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, di samping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya.
- 3) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

Sedangkan tujuan perencanaan kurikulum yaitu:

- 1) Bertujuan sebagai acuan pengawasan, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara pelaksanaan dengan perencanaan;
- 2) Mengetahui jadwal kegiatan dan waktu selesainya;
- 3) Mengetahui keterlibatan sumber daya organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 4) Sistematisasi kegiatan baik sisi biaya maupun kualitas kegiatan;
- 5) Efisiensi biaya,waktu,dan tenaga;
- 6) Gambaran kegiatan yang universal;

⁶⁹.Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2010),h 152.

- 7) Mengkoneksikan antar sub kegiatan;
- 8) Menemukan secara dini kesulitan yang akan dihadapi dan membantu pencapaian tujuan.⁷⁰

E. Karakteristik Perencanaan Kurikulum

Ada beberapa aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum diantaranya:

- 1) Memiliki konsep dasar yang jelas berdasarkan kebutuhan dasar manusia dan berbasis kebutuhan masyarakat;
- 2) Memperhatikan unsur proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien;
- 3) Memberi peran dan tanggungjawab kepada pendidik didalam merancang dan melaksanakan program sekolah yang mengarahkan peserta didik menuju tujuan pendidikan;
- 4) Terbuka bagi masyarakat luas untuk dapat mengakses dan mendapat informasi terkait program-program pendidikan melalui perumusan tujuan pendidikan bagi anak-anak mereka;
- 5) Responsif terhadap kebutuhan peserta didik;
- 6) Sesuai bakat dan minat peserta didik dan masyarakat;
- 7) Pelibatan unsur masyarakat dan peserta didik dalam perencanaan kurikulum dan pembelajaran;
- 8) Perencanaan kurikulum terintegrasi dengan pengalaman belajar yang relevan.

⁷⁰.Husaini Usman, "*Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*", (Jakarta: Bumi Aksara,2010), h 85

Oemar Hamalik menyebut aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum yaitu berdasarkan konsep yang jelas, dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, bersifat reaktif, tujuan berkaitan dengan minat anak dan ada partisipasi kooperatif.⁷¹

F. Landasan Perencanaan Kurikulum

Paling tidak ada lima hal yang memengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan dalam perencanaan kurikulum, yaitu filosofis, konten/materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran.⁷² Perencanaan kurikulum seharusnya berlandaskan kepada informasi dan data yang berkembang dan berhubungan erat dengan program dan kegiatan yang sedang berkembang di lembaga pendidikan atau sekolah. Fokus utama informasi dan data dalam perencanaan kurikulum di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut ⁷³:

- 1) Kekuatan sosial yaitu perencanaan kurikulum seharusnya beradaptasi dengan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, seperti situasi politik, sosial, budaya, ekonomi.
- 2) Perlakuan pengetahuan yaitu merancang kurikulum berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dimana fakta dan data yang didapat dikumpulkan dan diolah serta

⁷¹.Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal.151

⁷².Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.21.

⁷³.Wahyu Bagja Sulfemi, "Manajemen Kurikulum di Sekolah", (Bogor: Visi Nusantara Maju, 2018), h 47

dihubungkan dengan perilaku individu dalam proses belajar, bagaimana sikap, emosi, dan perasaan terhadap proses pembelajaran.

- 3) Pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu data dan informasi terkait dengan perkembangan manusia. Informasi dan data ini sangat penting dimana setiap kegiatan yang ada di sekolah membuka ruang pengembangan program sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik. Peran guru menjadi sangat penting untuk merencanakan kurikulum atau kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa.

Dalam hal penyusunan kurikulum, Herman H. Horne⁷⁴ memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum menjadi tiga bagian, diantaranya adalah:

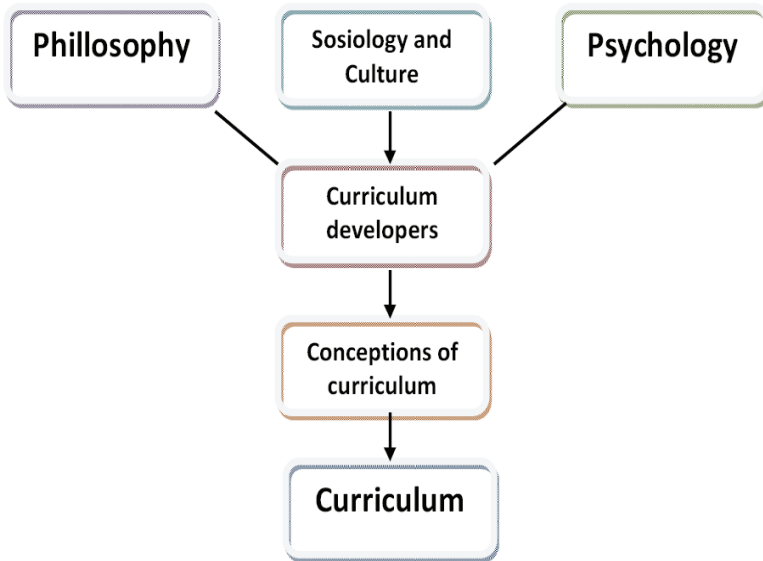
- 1) Dasar Psikologis, digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik (*the ability and need of children*).
- 2) Dasar sosiologis, digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat (*the legitimate demands of society*) terhadap pendidikan.
- 3) Dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai (*the kind of universe in which we live*).

Peran Landasan Kurikulum Menurut Lowton dapat dilihat pada gambar 2 berikut:⁷⁵

⁷⁴.Herman H. Norne, dalam Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2010), h. 195.

⁷⁵.Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Teori dan Praktik Pengembangan KTSP, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2010), h. 38.

Gambar 2. Landasan Kurikulum Menurut Lowton



Terkait dengan penyusunan kurikulum pendidikan Islam tidak cukup hanya didasarkan pada tiga landasan di atas, hal ini dikarenakan dalam pendidikan Islam ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mentransfer dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai titik sentral tujuan dan proses pendidikan Islam.⁷⁶

Al-Syaibani memberikan landasan yang jelas tentang kurikulum pendidikan Islam yaitu:⁷⁷

- 1) Dasar agama, yang menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan pada Al-

⁷⁶.Oemar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, diterjemahkan Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 485

⁷⁷.Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2010), h. 195.

Qur'an, as-sunnah dan sumber-sumber yang bersifat *furu'* lainnya,

- 2) Dasar Falsafah, dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi,
- 3) Dasar Psikologis, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perorangan antara satu peserta didik dengan yang lainnya;
- 4) Dasar Sosial, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar social yang mengandung ciri-ciri masyarakat islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berfikir dan adat kebiasaan, seni dan sebagainya.

G. Model Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan proses yang rumit dan kompleks. Terkait hal tersebut ada beberapa model perencanaan kurikulum menurut *Oemar Hamalik* , diantaranya:

- 1) Rasional deduktif atau *rasional tyler*. Model ini fokus pada logika dalam menyusun program kurikulum dan memiliki kecenderungan kurang memperhatikan

dinamika lingkungan tugas. Cocok untuk perencanaan bersifat sentralistik.

- 2) Model interaktif rasional (*the rational interactive model*). Sering disebut juga model situasional karena sifatnya yang fleksibel. Model ini berpegang pada nilai rasionalitas bukan berdasarkan urutan logik. Model ini merupakan refleksi masyarakat demokratis dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah.
- 3) *The Diciplines Model*. Dimana guru menjadi perencana kurikulum karena dianggap memiliki pertimbangan terkait nilai filosofis, sosiologi, psikologi pendidikan.
- 4) Model tanpa perencanaan (*non planning model*). Model ini berbasis masukan/pertimbangan intuitif guru di ruang kelas.⁷⁸

⁷⁸.Oemar Hamalik dalam Ibrahim Nasbi, Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis, dalam *Jurnal Idaarah*, Vol I, No.2, Desember 2017, h 324

BAB III

ORGANISASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Organisasi Kurikulum Pendidikan Islam

Menurut *Hicks* dan *Gullet* pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagi tugas, tanggung jawab dan wewenang diantara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁹ Pengorganisasian merupakan suatu mekanisme atau suatu struktur, yang dengan struktur itu semua subjek, perangkat lunak dan perangkat keras yang kesemuanya dapat bekerja secara efektif, dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan porposinya masing-masing.⁸⁰ Adapun pengertian organisasi kurikulum banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut *Nasution* organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.⁸¹
- 2) Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum, seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan

⁷⁹.Marno dan Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Malang: Refika Aditama, 2013), h. 16

⁸⁰.Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 21

⁸¹.S.Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 135

- sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan.⁸²
- 3) Pengorganisasian Kurikulum merupakan perpaduan antara beberapa kurikulum, yang pada akhirnya muncul berbagai keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum, namun tetap menjadi satu kesatuan yang nantinya akan sama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.⁸³
 - 4) Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan.⁸⁴
 - 5) Menurut Sukiman, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan.
 - 6) Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan.⁸⁵
 - 7) Pengorganisasian kurikulum merupakan proses

⁸².Muhammad Ansyar, *Kurikulum, Fondasi, Desain, dan Pengembangan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2015)

⁸³.Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 67

⁸⁴.Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2011).

⁸⁵.Muhammad Zain, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62.

menyusun organisasi kurikulum secara formal dengan aktivitas merancang struktur, menganalisis beban materi pelajaran, menganalisis kualifikasi materi pelajaran, mengelompokkan dan membagikan beban materi pelajaran pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.⁸⁶

Dari berbagai definisi tentang organisasi kurikulum di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan organisasi kurikulum pendidikan Islam yaitu susunan komponen kurikulum pendidikan Islam, seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, dan sebagainya kemudian dikelompokkan dan dibagi sesuai beban materi pelajaran pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mempermudah siswa memahami pelajaran sehingga dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan serta untuk mencapai efektivitas pendidikan Islam. Kegiatan belajar di sekolah tentu berbeda dengan kegiatan belajar di luar sekolah. Di sekolah, semua kegiatan dan pengalaman belajar diatur dan diorganisasikan secara formal, terutama berkaitan dengan kapan dan di mana kegiatan belajar dilakukan. Sekalipun demikian, apa yang harus dipelajari peserta didik tetap harus terstruktur, terutama berkaitan dengan mata pelajaran. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan penyampaian bahan pembelajaran, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian

⁸⁶.Teguh Triwijiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2015), h. 152.

bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum.⁸⁷

B. Unsur-Unsur Organisasi Kurikulum

Berikut ini yang merupakan unsur-unsur organisasi kurikulum antara lain:

1) Konsep

Yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas, dan kualitas, ruangan, dan evolusi.

2) Generalisasi

Membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya.

3) Keterampilan

Yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data.

⁸⁷.S.Nasution, *Asas-Asas kurikulum*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 176.

4) Nilai-nilai

Yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial-ekonomi.

Mengorganisasi unsur-unsur kurikulum harus mampu memilih tujuan yang jelas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik minat maupun bakat peserta didik. Jika tujuan kurikulum berkaitan dengan domain moral dan etika sebagai fungsi dan integratif sebagaimana tujuan dan fokus dari pendidikan Islam, maka nilai-nilai merupakan unsur organisasi yang tepat.⁸⁸

C. Faktor-faktor dalam Organisasi Kurikulum

Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Ruang Lingkup (*Scope*)

Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis-jenis organisasi kurikulum

⁸⁸.Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2011).

bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan pelajaran yang berbeda sehingga kegiatan dan pengalaman belajar pun juga berbeda. Setelah memilih dan menentukan ruang lingkup bahan pelajaran, kemudian disusun dalam organisasi kurikulum tertentu sesuai dengan yang diinginkan (*Abdullah Idi, 2007*).

2) Urutan (*Sequence*)

Sequence menentukan urutan bahan pelajaran disajikan, apa yang dahulu apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalnya hanya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami, atau bila telah dimiliki keterampilan-keterampilan tertentu atau bila perkembangan-perkembangan anak telah mencapai taraf tertentu. Faktor-faktor yang turut menentukan urutan bahan pelajaran antara lain; 1) kematangan anak, 2) latar belakang pengalaman atau pengetahuan, 3) tingkat inteligensi, 4) minat, 5) kegunaan bahan, dan 6) kesulitan bahan pelajaran (*Nasution, 1993*).

3) Kesenambungan (*Continuity*)

Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara

vertikal maupun horizontal.

4) Terpadu (*Integrated*)

Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan *subject centered curriculum*, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Maka dari itu harus adanya fokus pada permasalahan yang perlu dipecahkan berdasarkan bidang-bidang kehidupan. Untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh, maka keterpaduan ini bukan hanya dilakukan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran, tetapi juga oleh peserta didik melalui pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang saling berhubungan.

5) Keseimbangan (*Balance*).

Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yakni; 1) keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari, dan 2) keseimbangan cara atau proses belajar. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran. Ada yang menganggap bahwa semua mata pelajaran sama pentingnya dari segi edukatif, ekonomi, studi lanjutan, pembangunan negara, dan sebagainya. Kalau hanya berbicara tentang kepentingan tentu semua bahan pelajaran adalah penting, tetapi kepentingan tersebut harus dikaitkan dengan pembentukan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh.

6) Waktu (*Times*)

Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Disini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, berapa kali seminggu dan berapa lama tiap mata pelajaran. Apakah mata pelajaran itu dipadatkan pada satu semester ataukah disebarakan selama beberapa tahun. Penelitian tentang distribusi dan efektivitas kurikulum sangat langka. Maka karena itu distribusi waktu kebanyakan didasarkan atas tradisi pengalaman, atau pertimbangan para pengembang kurikulum. Sering juga terjadi tawar-menawar. Sebagai pasangan biasanya digunakan betapa pentingnya nilai dan tujuan mata pelajaran. Nilai ini dapat berubah menurut keadaan zaman sehingga jumlah jam yang disediakan dapat berkurang atau bertambah.

D. Prosedur Mereorganisasi Kurikulum

Beberapa cara mereorganisasi kurikulum yaitu sebagai berikut:

1) Reorganisasi melalui Mata Pelajaran

Reorganisasi melalui mata pelajaran ialah buku merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum.

2) Reorganisasi dengan Cara Tambal Sulam

Memilih kurikulum yang baik yang sesuai

dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik.

3) Reorganisasi melalui Analisis Kegiatan

Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa. Bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan/ materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata.

4) Reorganisasi melalui Fungsi Sosial

Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial, bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

5) Reorganisasi melalui Survei Pendapat

Survei pendapat bisa dilakukan dari beberapa pihak. seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah.

6) Reorganisasi melalui Studi Kesalahan

Pada tahap ini bisa dilakukan analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya.

7) Reorganisasi melalui Analisis Masalah Remaja

Ross Moaney dan kawan-kawan menganalisis 330 masalah kebutuhan remaja yang dibagi menjadi 11 kelompok, yaitu: perkembangan jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan pekerjaan, kegiatan sosial dan rekreasi, berkeluarga, menikah dan seks,

hubungan sosial secara psikologis, hubungan pribadi, moral, dan keagamaan, rumah tangga dan kerabat, pendidikan dan kerja sama, penyesuaian terhadap pekerjaan sekolah, kurikulum dan prosedur pembelajaran.

E. Model-model Organisasi Kurikulum

Ada beberapa ragam pengorganisasian kurikulum, diantaranya yaitu:

1) Kurikulum Berdasarkan Mata Pelajaran (*subject centered curriculum*)

Setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikannya. Walaupun mata pelajaran itu diberikan oleh guru yang sama, hal itu juga dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena organisasi bahan atau isi kurikulum berpusat pada mata pelajaran secara terpisah-pisah, maka kurikulum ini dinamakan *separated subject curriculum* (SSC). Kurikulum terpisah-pisah dimana bahan ajar disajikan secara terpisah-pisah seolah-olah ada batasan antara bidang studi yang sama dikelas yang berbeda (*Taufik Rizki Sista, 2017*). Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar menghafal pelajaran atau membuat rangkuman daripada melakukan diskusi atau pemecahan masalah, karena tujuan utama kurikulum adalah agar peserta didik menguasai pengetahuan. Bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah dalam: 1) bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak ada hubungannya antara materi satu dengan yang

lainnya, 2) bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual, 3) proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif, 4) bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat, 5) bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang, 6) proses dan bahan pelajaran sangat kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. (Rusman, 2009) Keuntungannya ialah bahwa pengetahuan yang telah dimiliki itu telah disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk disiplin ilmu oleh para ahli dan ilmuwan. Disiplin ilmu tidak hanya mempunyai isi, atau bahan akan tetapi juga memiliki, metode atau cara berpikir tertentu sehingga cabang ilmu itu dapat selanjutnya dikembangkan. Jadi dengan mempelajari disiplin ilmu itu para siswa tidak hanya memperluas pengetahuannya melainkan juga memperoleh cara-cara berpikir tertentu. Dengan demikian mereka dibekali dengan produk dan proses berpikir disiplin ilmu itu (Nasution, 1993).

2) *Correlated Curriculum* (Mata Pelajaran Gabungan)

Pada *correlated curriculum* ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Akan tetapi, mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi (*broadfield*). Pola kurikulum *correlated curriculum* ini menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkutan paut satu sama lain

(*correlated*) walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain (Razali M. Thaib & Irman Siswanto). Contohnya, mata pelajaran biologi, kimia fisika, dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Demikian juga dengan mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dikelompokkan dalam bidang studi IPS (Rusman, 2009). Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum ini. Kekurangannya adalah sebagai berikut: 1) bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam, 2) kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa, 3) kurikulum ini kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa, 4) apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Sementara itu, kelebihan pola mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*) adalah sebagai berikut: 1) bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran, 2) memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi, 3) menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis.

3) *Broad Field Curriculum* (Cakupan Luas)

Ciri-ciri kurikulum bidang studi antara lain: 1) Kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama, 2) Bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu masalah (*core subject*) tertentu, kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan, 3) Bahan pelajaran disusun

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, 4) Strategi pembelajaran bersifat terpadu, 5) Guru berperan sebagai guru bidang studi, dan 6) Penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

4) *Integrated Curriculum* (Kurikulum Terpadu)

Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum yang menggunakan model *integrated*, tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Dengan belajar melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual, tetapi juga seluruh aspek, seperti sikap, emosi, dan keterampilan. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran akan dapat membentuk kemampuan siswa secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual

sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa sebagai individu yang utuh sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam kurikulum bentuk ini. Kekurangan kurikulum diantaranya sebagai berikut:

- ✓ ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan,
- ✓ kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis,
- ✓ diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok,
- ✓ guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini,
- ✓ masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini.

Sementara itu, kelebihan kurikulum ini adalah sebagai berikut:

- ✓ mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan,
- ✓ memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu,
- ✓ memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama (*cooperative*),

- ✓ mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran,
- ✓ memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal,
- ✓ memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung,
- ✓ dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat,
- ✓ dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain,
- ✓ bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis,
- ✓ bahan pelajaran tidak bersifat sederhana,
- ✓ dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda secara mencolok,
- ✓ memungkinkan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, perlu adanya pengorganisasian yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi kekurangan - kekurangan tersebut.

5) Kurikulum Inti (*Core Curriculum*)

Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu (*integrated curriculum*). Ada beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini:

- ✓ kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan (*continue*) selalu berkaitan dan direncanakan secara terus menerus,
- ✓ isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan,

- ✓ isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual,
- ✓ isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial,
- ✓ isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadau.

6) *Experience* atau *Activity Curriculum*.

Experience curriculum sering disebut juga dengan *activity curriculum*. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini pada hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa (*Rusman, 2009*).

Sedangkan menurut *Evelyn J. Sowell* konsep organisasi kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) *Subject matter designs*:
 - a) Single subject designs
 - b) Correlated subjects
 - c) Broad fields
 - d) Interdisciplinary integrated studies
 - e) Thematic instruction
- 2) *Society-culture-based designs/social function and activities designed*

- 3) *Learner-based designed:*
 - a) Organic curriculum
 - b) Development curriculum
- 4) Other designs:
 - a) Technology as curriculum
 - b) *School-to-work curriculum*
 - c) *Core curriculum*

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGONTROLAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Implementasi Kurikulum Pendidikan Islam

Implementasi kurikulum memiliki beberapa pengertian diantaranya:

- 1) Implementasi kurikulum merupakan tindakan operasional berdasarkan perencanaan kurikulum. Salah satu bentuk implementasi kurikulum adalah proses pembelajaran.⁸⁹
- 2) Implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Implementasi kurikulum juga merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.⁹⁰
- 3) Implementasi kurikulum merupakan penerapan gagasan, konsep potensi kurikulum (dalam bentuk dokumen kurikulum) ke dalam bentuk aktual kurikulum pembelajaran.⁹¹

⁸⁹.Wiji Hidayati, *Pengembangan kurikulum*, (Yogyakarta, Pedagogia, 2012) h. 98.

⁹⁰.Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, (Bandung: Alfabeta 2013), hal. 39

⁹¹.Wiji Hidayati, "Implementation of Curriculum 201 in Primary School Sleman Yogyakarta" dalam IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME) Volume 6, Issue 2 Ver. II (Mar. - Apr. 2016), hlm. 8.

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan implementasi kurikulum pendidikan Islam yaitu penerapan gagasan dan konsep kurikulum pendidikan Islam dari bentuk dokumen kurikulum ke dalam bentuk aktual kurikulum pembelajaran. Ada tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum menurut *Mars* yang dikutip oleh *Mulyasa*⁹², yaitu :

- 1) Dukungan kepala sekolah;
- 2) Dukungan rekan sejawat;
- 3) Dukungan internal dari dalam guru itu sendiri.

Faktor guru itu sendiri menjadi sangat dominan diantara faktor yang lainnya, mengingat peran sentral guru didalam pelaksanaan kurikulum di lembaga pendidikan. Menurut *Kunandar* implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi.⁹³

Implementasi kurikulum diwujudkan dalam beberapa pokok kegiatan diantaranya:

- 1) Kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah;
- 2) Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru;
- 3) Kegiatan yang berhubungan dengan murid;
- 4) Kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar;
- 5) Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler;
- 6) Kegiatan pelaksanaan evaluasi;
- 7) Kegiatan pelaksanaan pengaturan alat;

⁹².Mulyasa, "Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan", (Bandung:Remaja Rosdakarya,2006),h 247

⁹³.Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007), h 236

- 8) Kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan;
- 9) Kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu professional guru.⁹⁴

Untuk memastikan bahwa adopsi atau implementasi model kurikulum yang dirancang dengan baik dan dapat berproses sesuai dengan yang direncanakan, dibutuhkan kesiapan manajemen dan perilaku organisasi yang dipastikan dapat memperlancar implementasi tersebut. Dalam kaitan ini kesiapan manajemen (*readiness*) merujuk kepada kesiapan segenap pemangku kepentingan mulai dari pimpinan, staf akademik dan nonakademik, termasuk daya dukung sistem yang ada dalam mengimplementasikan suatu program dalam bentuk kesiapan mengadopsi kebijakan baru dan melakukan institusionalisasi.

Implementasi kurikulum terdiri dari implementasi kurikulum tingkat sekolah dan implementasi kurikulum tingkat kelas atau tingkat mata pelajaran yang merupakan pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas.⁹⁵ Kepala sekolah bertanggung jawab dalam implementasi kurikulum tingkat sekolah serta dituntut untuk melaksanakan kegiatan seperti menyusun kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum. Sedangkan implementasi kurikulum tingkat kelas, ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini di antaranya meliputi kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar, pembinaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang tujuan sekolah, dan kegiatan bimbingan

⁹⁴. Evelyn J Sowell, *Curriculum An Integrative introduction*, Edisi III; (New York: Pearso Education, Inc,tt), h 169

⁹⁵. Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 18.

belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri peserta didik dan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah.⁹⁶

B. Implementasi Kurikulum Tingkat Sekolah/Madrasah

Kepala sekolah/madrasah memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan kurikulum dilingkungan sekolah. Diantara kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu menyusun agenda tahunan dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, memimpin jalannya rapat, membuat statistik, dan menyusun laporan.⁹⁷

Berdasarkan garapan seorang administrator sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab membuat rencana-rencana, yaitu:

- 1) Perencanaan bidang kemuridan/kesiswaan.
- 2) Perencanaan bidang personal atau tenaga kependidikan.
- 3) Perencanaan bidang sarana kependidikan.
- 4) Perencanaan bidang ketatausahaan sekolah.
- 5) Perencanaan bidang pembiayaan atau anggaran pendidikan.
- 6) Perencanaan bidang Organisasi sekolah.
- 7) Perencanaan bidang hubungan kemasayarakatan/komunikasi pendidikan.⁹⁸

⁹⁶.Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung; Alfabeta, 2009),h 195

⁹⁷. Syafaruddin dan Amiruddin, *Manajemen Kurikulum*,...h 95

⁹⁸.Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007), h.176.

C. Implementasi Kurikulum Tingkat Kelas/ Mata Pelajaran

Guru merupakan ujung tombak pendidikan, oleh karena itu para guru dituntut mampu mengembangkan kurikulum pembelajaran di kelas yang didasarkan pada teori-teori pengembangan kurikulum dan pengalaman mengajar di kelas sebagai figur pelaksana kurikulum. Guru memiliki peran sebagai *pekerja* profesional dalam artian guru dengan kompetensinya sebagai seorang pendidik dan memiliki naluri mendidik, bertindak sebagai generator pembangkit semangat siswa baik sebagai motivator, fasilitator, inovator dan sebagainya mampu memberikan internalisasi berupa pembelajaran yang benar-benar sampai pada proses mendidik.⁹⁹

Dalam proses pembelajaran, implementasi kurikulum meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 menerangkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.¹⁰¹ Sehingga kegiatan pembelajaran diawali dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

⁹⁹.Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h.48.

¹⁰⁰.Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), h 173

¹⁰¹. Salinan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19, h 10.

yang dikembangkan oleh guru yang berpedoman pada Silabus.¹⁰² Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti di sekolah misalnya, sebagai upaya memperkuat pendekatan *scientific* (ilmiah) bisa menerapkan enam indikator berikut: *Indicator of basic scientific learning skill are: ability to (1) observe, (2) measure, (3) classify, (4) communicate, (5) guest, and (6) conclude.* Yaitu kemampuan untuk mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mempresentasikan, dan menyimpulkan.¹⁰³

D. Prinsip-Prinsip Implementasi Kurikulum

1) Perolehan kesempatan yang sama

Pada dasarnya seluruh peserta didik memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang meliputi pengajaran, keterampilan, dan sikap.

2) Berpusat pada anak

Mendorong Peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mengembangkan potensinya, mampu bekerjasama serta mampu untuk melakukan penilaian diri sendiri.

3) Pendekatan dan kemitraan

Kebutuhan peserta didik menjadi fokus utama dalam mengorganisasikan pengalaman belajar yang disusun secara berkelanjutan dari jenjang yang

¹⁰².Salinan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Bo 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013, h. 31.

¹⁰³.Istiningsih dan Wiji Hidayati, "The Correlation Of Students' Character With Scientific Learning Skill (Study On Basic School In Indonesia)," dalam IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) Volume 5, Issue 3 Ver. III (May - Jun. 2015), h. 31.

terendah sampai tertinggi. Kerjasama dan kemitraan antara peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja dan industri, orang tua dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian pengalaman belajar.

- 4) Kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan

Standar kompetensi di susun oleh pusat dengan cara pelaksanaannya di sesuaikan dengan kebutuhan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah.¹⁰⁴

Menurut *Kunandar* dalam *Bukunya Guru Profesional*, implementasi kurikulum di satuan pendidikan harus mengedepankan prinsip-prinsip:

- 1) Memperhatikan potensi dan perkembangan peserta didik sehingga mampu mengekspresikan dirinya secara dinamis dan menyenangkan serta mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mereka;
- 2) Memperhatikan lima pilar belajar yaitu, (1) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, (2) belajar untuk memahami dan menghayati (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- 3) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan,

¹⁰⁴.Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (RemajaRosdakarya: Bandung,2007), h 239

pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang dimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.

- 4) Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab terbuka dan hangat dengan prinsip *tutwuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (dibelakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh teladan)
- 5) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan kedekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- 6) Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- 7) Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis

serta jenjang pendidikan.¹⁰⁵

Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam implementasi kurikulum sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

E. Model-Model Implementasi Kurikulum dan Pembelajaran

Beberapa model implementasi kurikulum dan pembelajaran oleh *Rusman*¹⁰⁶ yaitu:

1) *The Concerns-Based Adoption Model (CBAM)*

Model ini berusaha mengidentifikasi seberapa besar guru peduli dengan inovasi di dalam kurikulum. Disini guru menjadi agen perubahan dalam menginovasi kurikulum karena guru merupakan pelaksana pembelajaran dan kurikulum merupakan dokumen panduannya. Guru banyak memberi pengaruh terhadap pembelajaran dari pengalaman pribadi guru itu sendiri, inilah mengapa menjadi penting untuk mempersiapkan guru yang akan mengimplementasikan kurikulum tersebut. Dan yang lebih penting menguatkan kepedulian guru di dalam melaksanakan inovasi kurikulum.

2) *Model Leithwood*

Fokus model ini adalah guru. hal ini berangkat dari asumsi bahwa kesiapan setiap guru untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda. Selain itu implementasi kurikulum dan pembelajaran

¹⁰⁵.Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Press, h.142-143.

¹⁰⁶.Rusman. *Manajemen Kurikulum* ,...h.77

merupakan hubungan timbal balik sehingga dalam tahapannya perlu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan individu. Model ini memfasilitasi guru dengan strategi dalam menyelesaikan hambatan dalam implementasi kurikulum. Membekali guru dengan persiapan-persiapan melalui seminar, pelatihan, magang, dan pembelajaran mandiri ketika akan mengimplementasikan kurikulum.

3) Model Teori

Perubahan sosial menjadi fokus dari model implementasi kurikulum dan pembelajaran ini. Tujuannya yaitu memberikan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan. Model ini juga memfasilitasi guru dengan skala agar mudah untuk mengidentifikasi ide atau gagasan baru apa saja yang dapat diterima oleh lingkungan sehingga ada petunjuk dan arahan yang jelas untuk sebuah perubahan atau inovasi. Esensi model ini adalah :

- a) *Trusting*-menumbuhkan kepercayaan diri;
- b) *Opening*-menumbuhkan dan membuka keinginan
- c) *Realizing*-mewujudkan, dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan; dan
- d) *Interpending*-saling ketergantungan dengan lingkungan

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kurikulum untuk mampu beradaptasi, sehingga model – model implementasi kurikulum di atas dapat

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat implementasi kurikulum. oleh karena itu, keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kompetensi peserta didik ditentukan oleh kesiapan dalam mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran.¹⁰⁷

F. Pengontrolan Kurikulum Pendidikan Islam

Pengontrolan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam sebuah organisasi harus berjalan secara sistematis sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan serta target dan standar kerja dapat terukur dengan baik.¹⁰⁸ Menurut *T Hani Handoko* proses pengontrolan memiliki lima tahapan:¹⁰⁹

- 1) penetapan standar pelaksanaan;
- 2) pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata;
- 4) perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan dan ;
- 5) pengambilan tindakan.

Pemantauan dan penilaian kurikulum merupakan salah satu fungsi manajemen kurikulum sebagai tugas yang harus dikerjakan seorang manajer mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai perancang, pelaksana, dan evaluator sistem pendidikan nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta kecamatan dalam ruang

¹⁰⁷ . Syafaruddin dan Amiruddin, *Manajemen Kurikulum*,...h 81

¹⁰⁸ . Richard L Daft. (2008). *New Era of Management*, New Jersey: South Western, h.378.

¹⁰⁹ . Rusman, *Manajemen...*, h. 126.

lingkup kewilayahan pendidikan, pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.¹¹⁰

Sedangkan proses pengontrolan kurikulum pada satuan pendidikan harus mengacu kedalam beberapa asas sebagai berikut:

- 1) Asas kepercayaan serta amanah oleh kepala sekolah didalam pengelolaan sekolah yang baik.
- 2) Asas tanggungjawab dari kepala sekolah kepada seluruh warga sekolah untuk tunduk kepada keputusan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku didalam mengatur proses pendidikan yang berjalan di lembaga pendidikan.

Pengontrolan kurikulum di lembaga pendidikan bisa dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Guru yaitu berhubungan dengan metode pembelajaran;
- 2) Siswa berhubungan dengan aspek penilaian perkembangannya;
- 3) Orang tua yaitu berhubungan dengan dukungan dan informasi dari sekolah tentang perkembangan anaknya di sekolah;
- 4) Pembiayaan kegiatan sekolah.¹¹¹

¹¹⁰.Oemar Hamalik,*Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008)h.217.

¹¹¹.Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter pada Satuan Pendidikan, dalam *Jurnal Pendidikan Humaniora Vol. 2 No. 1*, Hal 65-74, Maret 2014.

BAB V

EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Evaluasi Kurikulum

Untuk menilai suatu kurikulum yang diimplementasikan dalam lembaga pendidikan maka perlu diadakan evaluasi kurikulum. Suatu evaluasi yang baik dilakukan secara komprehensif mencakup semua langkah kegiatan, dan komponen kurikulum, menilai dari dokumen kurikulum, pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, fasilitas penunjang serta para pelaksana kurikulum.¹¹² Namun sebelum membahas lebih jauh tentang evaluasi kurikulum alangkah baiknya untuk mengetahui apa definisi dari evaluasi kurikulum. Menurut S Hamid Hasan yang dikutip oleh Rusman, evaluasi diartikan dengan berbagai pengertian. Hal tersebut disebabkan filosofi keilmuan yang dianut seseorang berpengaruh terhadap metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi itu sendiri. Banyak variasi batasan dan pengertian dari evaluasi yang diberikan oleh para ahli, tergantung dari bidang keahlian dan bidang yang dievaluasi.¹¹³ Berikut ini definisi evaluasi oleh beberapa ahli:

- 1) Menurut *Wirawan*¹¹⁴ “evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya

¹¹².Nana Syaodih Sukmadinata, *Kurikulum dan Pembelajaran* dalam Muhammad Ali, dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. (Bandung: Pedagogiana Press,2007) h.457.

¹¹³.Sukardi , *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), h.7

¹¹⁴.Wirawan, “ *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*” (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 7.

dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”.

- 2) Menurut *Rusman* “evaluasi adalah penyediaan informasi untuk kepentingan memfasilitasi pembuatan keputusan dalam berbagai langkah pengembangan kurikulum. Informasi berkaitan dengan program sebagai kesatuan utuh atau hanya berkenaan dengan beberapa komponen. Evaluasi juga mengaplikasikan pemilihan kriteria, sekumpulan data dan analisis”.¹¹⁵
- 3) Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.¹¹⁶
- 4) Menurut *Vedung*, *Evaluation is the process of determining worth, merit and value of the things*. Evaluasi merupakan proses untuk menentukan harga dan nilai sesuatu.¹¹⁷
- 5) Evaluasi menurut *Tyler* yang dikutip oleh *Wahyudin* adalah “*the process for determining the degree to which these change in behavior are actually taking place*”, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada

¹¹⁵.Rusman, *Manajemen Kurikulum*. (Jakarta: Rajawali Press,2009), h.98.

¹¹⁶.Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 3-4.

¹¹⁷.Vedung, “ Public Policy and Program Evaluation”, dalam Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hlm.7

hasil belajar (behavior).¹¹⁸

- 6) Istilah evaluasi biasanya merujuk kepada proses membuat penilaian, menetapkan nilai atau memutuskan yang baik.¹¹⁹

Menurut Sukmadinata, evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang berdiri sendiri. Ada juga yang berpendapat antara keduanya tidak ada hubungan, tetapi ada yang menyatakan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Pihak yang memandang ada hubungan, hubungan tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Perubahan dalam kurikulum berpengaruh pada pelaksanaan kurikulum. Hubungan antara evaluasi dengan kurikulum bersifat organis, dan prosesnya berlangsung secara evolusioner. Pandangan-pandangan lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, secara berangsur-rangsur diganti dengan pandangan baru yang lebih sesuai.¹²⁰ Adapun evaluasi kurikulum di definisikan dengan berbagai pengertian oleh para ahli, diantaranya evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis dimana informasi tentang suatu kurikulum dikumpulkan kemudian dipakai untuk mempertimbangkan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu.¹²¹

Permendikbud 159 Tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis dan sistemik dalam

¹¹⁸.Dinn Wahyudin,*Manajemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014),h. 27.

¹¹⁹.Richard L Arends,*Learning to Teach*, (New York: McGraw Hill,2004), h.218.

¹²⁰.Nana Syaodih Sukmadinata.*op.cit*, h. 172.

¹²¹.Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014),h. 27.

mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum pendidikan Islam adalah serangkaian kegiatan yang terencana, sistematis dan sistemik dengan tujuan mengumpulkan dan mengolah informasi, serta memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan Islam.

Dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penataan standar Nasional Pendidikan dikemukakan beberapa ketentuan tentang penilaian/evaluasi kurikulum sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
- 2) Evaluasi kurikulum dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
- 3) Evaluasi muatan nasional dan muatan lokal dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 5) Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
- 6) Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat.
- 7) Evaluasi Kurikulum digunakan untuk

penyempurnaan kurikulum.

Sukmadinata menyatakan bahwa evaluasi kurikulum berperan penting dalam penentuan kebijakan pendidikan secara umum dan mengambil keputusan dalam kurikulum khususnya. Evaluasi kurikulum menjadi hal yang kompleks dikarenakan banyaknya aspek yang harus dievaluasi, banyaknya orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Disamping itu, evaluasi kurikulum juga berhubungan dengan definisi kurikulum yang diberikan, apakah berupa bahan pelajaran menurut disiplin ilmu atautkah dalam arti yang luas meliputi pengalaman anak di dalam maupun di luar kelas.¹²²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses menilai keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan, apakah sudah mencapai tujuan atau belum dalam rangka memberikan masukan dan membuat keputusan untuk perbaikan program yang dilaksanakan lebih lanjut. Dengan begitu, evaluasi kurikulum dapat dilakukan oleh semua level manajemen kementerian pendidikan nasional, termasuk yang diberikan kewenangan adalah Pusat Kurikulum Nasional sebagai unit pelaksana teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Tim pengembang kurikulum pada tingkat satuan pendidikan melaksanakan pengembangan kurikulum dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas relevansi dan program pendidikan nasional pada semua jenjang pendidikan, tidak

¹²².Sukiman, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya, 2015),h 194

terkecuali satuan pendidikan yang dikembangkan dan dalam tanggung jawab Kementerian Agama RI.¹²³

B. Tujuan Dan Fungsi Evaluasi Kurikulum

Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian dari suatu kegiatan serta melihat sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan. Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dirumuskan secara rinci, sehingga dapat benar-benar diketahui kegiatan mana yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak. Diantara tujuan pelaksanaan evaluasi kurikulum yaitu;

- 1) Mengukur efektifitas suatu kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan (*feed back*) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum.¹²⁴ Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para perencana, pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.
- 2) Mengetahui hasil dari implementasi kurikulum yang digunakan. Kurikulum hanyalah sebagai benda mati berupa kumpulan konseptual yang dihasilkan manusia berdasarkan pikiran, pengalaman, peradaban, sejarah, dan nilai-nilai maupun dokumen tentang rencana, pelaksanaan, dan evaluasi

¹²³ . Syafaruddin dan Amiruddin, *Manajemen Kurikulum*,...h 106

¹²⁴ . Zainal Arifin.(2012).*Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2012),h.263.

pembelajaran anak didik di dalam maupun di luar kelas (perpustakaan, laboratorium, atau praktik lapangan, observasi, studi proyek, dll). Pada tingkat pelaksanaan kurikulum sebagaimana kegiatannya diwujudkan dalam pembelajaran anak didik, dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran, tidak bisa serta merta diketahui hasilnya kecuali dilakukan evaluasi oleh evaluator, baik pejabat bidang pendidikan, maupun kepala sekolah, pengawas dan guru.

- 3) Menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika zaman. Keberadaan kurikulum sebagai kumpulan konseptual tentang tujuan, materi, metode, media dan evaluasi proses dan hasil menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran bagi anak didik, khususnya yang dijadikan guru sebagai pedoman untuk membelajarkan anak didik, sehingga potensi mereka berkembang secara maksimal. Oleh sebab itu, kurikulum dari waktu ke waktu menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Karena dalam manajemen pendidikan, bidang kurikulum merupakan bagian integral dari manajerial yang harus mendapat peninjauan terus menerus sejalan dan dinamika perkembangan zaman.

Menurut Hamid Hasan, tujuan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan.
- 2) Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.
- 3) Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum.
- 4) Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan yang menjadi tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengukur capaian kurikulum yaitu, sejauh mana kurikulum dapat diimplementasikan. Serta berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan. Sehingga dengan adanya evaluasi kurikulum diharapkan didapatkan informasi mengenai;

- 1) Kesesuaian antara ide kurikulum dan desain kurikulum;
- 2) Kesesuaian antara desain kurikulum dan dokumen kurikulum;
- 3) Kesesuaian antara dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum; dan
- 4) Kesesuaian antara ide kurikulum, hasil kurikulum dan dampak kurikulum.

C. Proses Evaluasi Kurikulum

Kurikulum yang diimplementasikan sesuai dengan aturan akan mampu memberikan perubahan pada peserta didik. Implementasi sebuah kurikulum harus menjadi tanggungjawab seluruh elemen dibidang pendidikan baik pada tingkat *makro* (menteri pendidikan, dirjen pendidikan dasar dan menengah, para direktur), tingkat *meso* (Gubernur, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, kabupaten/kota) maupun tingkat *mikro* (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan guru-guru) di dalam sistem persekolahan. Karena itu, penyelenggara pendidikan bertanggung jawab terhadap pencapaian keberhasilan pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan. Perlu disusun sebuah program penilaian yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka penilaian kurikulum sebagai alat pengelola dan evaluator dalam menyelenggarakan penilaian kurikulum.

Adapun program penilaian kurikulum memuat hal-hal berikut:

- 1) Penentuan tujuan program penilaian
- 2) Penilaian terhadap instrumen penilaian
- 3) Pengadministrasian penilaian
- 4) Pengolahan data
- 5) Penganalisaan penafsiran
- 6) Pendayagunaan hasil penilaian
- 7) Pencatatan dan pelaporan.¹²⁵

Menurut S. Hamid Hasan, proses yang dapat dilalui oleh seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi adalah:

- 1) Kajian terhadap evaluasi, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan evaluator terhadap kurikulum atau bentuk kurikulum yang menjadi evaluannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum. Evaluator harus mempelajari secara mendalam latar belakang kelahiran suatu kurikulum, landasan filosofis dan teoretis kurikulum tersebut, ide kurikulum, model kurikulum yang digunakan untuk dokumen kurikulum, proses pengembangan dokumen kurikulum, proses implementasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar.
- 2) Pengembangan proposal evaluasi, berdasarkan kajian yang dilakukan pada langkah pertama maka evaluator kemudian mengembangkan proposalnya. Untuk itu maka evaluator memutuskan pendekatan dan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Evaluator dapat menentukan apakah yang akan digunakannya adalah evaluasi kuantitatif ataukah evaluasi kualitatif.
- 3) Pertemuan dan diskusi, dengan pengguna jasa evaluasi merupakan langkah penting dan menentukan. Hasil diskusi dengan pengguna jasa

¹²⁵.Oemar Hamalik,"*Manajemern Pengembangan Kurikulum*", (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008), h.217.

akan menentukan apakah proposal yang diajukan akan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jika evaluator berhasil meyakinkan calon pengguna jasa evaluasi maka proposal yang diajukan mungkin akan disetujui dan pekerjaan evaluasi akan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika pada pertemuan tersebut evaluator tersebut tidak berhasil meyakinkan calon pengguna jasa evaluasi maka proposal tersebut tidak terlaksana. Artinya, tidak ada pekerjaan evaluasi yang dilakukan berdasarkan proposal tersebut.

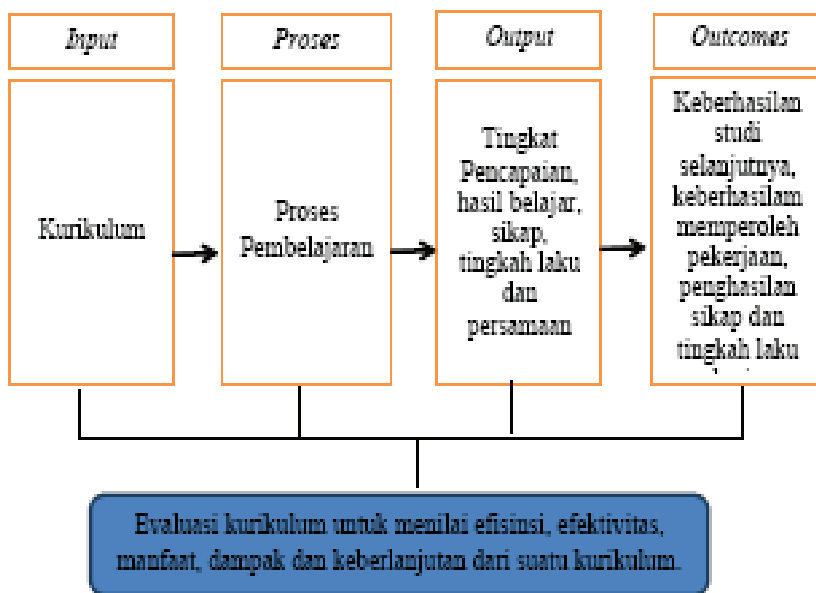
- 4) Revisi proposal, tidak lanjut dari hasil pertemuan antara pengguna jasa evaluasi dengan evaluator. Apabila dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut berbagai komponen harus direvisi maka adalah kewajiban evaluator untuk melakukan revisi tersebut. Hasil revisi harus diperlihatkan kembali kepada pengguna jasa evaluasi dan disetujui.
- 5) Rekrutmen personalia, kegiatan ini bisa saja dilakukan ketika proposal disusun.
- 6) Pengurusan persyaratan administrasi, setiap kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi kurikulum memerlukan berbagai formalitas administrasi. Evaluator harus mendapatkan persetujuan dari pengguna kurikulum, pimpinan sekolah atau atasannya dan mungkin juga dari pejabat yang terkait dengan masalah keamanan sosial politik.
- 7) Pengorganisasian pelaksanaan, suatu kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Semakin luas objek yang harus dievaluasi maka semakin banyak jumlah evaluator yang dibutuhkan dan akan semakin rumit pula pekerjaan manajemen yang harus dilakukan.
- 8) Analisis data, merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data evaluasi berhasil dilakukan. Ketika model yang digunakan adalah

model kuantitatif dan dengan demikian data utama evaluasi adalah data kuantitatif. Proses selanjutnya dalam pengelolaan data pada umumnya menggunakan jasa komputer. Analisis data adalah pekerjaan professional dan harus dilakukan oleh evaluator utama beserta evaluator tim. Analisis data merupakan bentuk tanggungjawab professional dan memerlukan wawasan dan pemahaman terhadap evaluasi untuk menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 9) Penulisan laporan, merupakan langkah yang harus dilakukan oleh evaluator dan para tim. Pada umumnya ada dua jenis laporan yang dapat dijadikan sebagai bentuk dalam penulisan hasil laporannya, diantaranya adalah (1) laporan eksekutif, yaitu model laporan yang ditulis dan dikembangkan untuk dibaca oleh para eksekutif yang pada umumnya memiliki waktu yang terbatas, (2) laporan lengkap, yaitu model laporan yang dikembangkan untuk dibaca oleh orang yang memiliki waktu yang luang.
- 10) Pembahasan laporan dengan pengguna jasa, pembahasan ini diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Dalam pembahasan ini jika pengguna jasa memerlukan tambahan informasi yang memang tercantum dalam kontrak maka adalah kewajiban evaluator untuk melengkapi laporan tersebut.
- 11) Penulisan laporan akhir, sebagai hasil dari revisi yang harus dilakukan evaluator ketika terjadi pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Jika dalam pembahasan tersebut pihak pengguna sudah tidak mengajukan revisi maka laporan awal dapat langsung dijadikan laporan akhir. Jika dari hasil pembahasan diperlukan berbagai revisi maka evaluator harus menulis laporan akhir berdasarkan revisi tersebut.

Dalam konteks ini, evaluasi kurikulum yang dilaksanakan akan menghasilkan tindak lanjut dengan melakukan pembentukan ulang dan pelaksanaan ulang kurikulum. Proses yang ditempuh ini mensyaratkan pengaturan ulang dan penyesuaian kebiasaan pribadi cara guru mengajar, cara bekerja, penekanan program, ruang kelas untuk pembelajaran, dan penjadwalan program kurikulum. Proses evaluasi kurikulum hingga sampai pada proses pembelajaran dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 3. Komponen Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran



Komponen Evaluasi Kurikulum dan pembelajaran

Sedangkan untuk metode dan teknik penting yang digunakan dalam evaluasi kurikulum meliputi diskusi, eksperimen, wawancara (kelompok dan pribadi) pendapat berbagai pemangku kepentingan instansi, observasi - prosedur, kuesioner, kinerja praktis dan catatan resmi.

D. Prinsip Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa prinsip berikut:

- 1) Prinsip relevansi, artinya relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Prinsip relevansi berkaitan dengan tiga segi, yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik; relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa depan; dan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.
- 2) Prinsip efektivitas, artinya sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Seperti prinsip efektivitas belajar peserta didik.
- 3) Prinsip efisiensi, artinya perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dan usaha yang telah dikeluarkan (*input*). Prinsip efisiensi dapat ditinjau dari waktu, tenaga, peralatan dan biaya.
- 4) Prinsip kesinambungan, artinya saling hubung atau jalin-menjalin antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah harus mempertimbangkan bahwa (a) bahan pelajaran pada tingkat sekolah selanjutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya; dan (b) bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah lebih rendah tidak perlu diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Kesinambungan antara berbagai bidang studi juga harus memperhatikan urutan penyajian dan terjalin dengan baik.
- 5) Prinsip fleksibilitas, artinya ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak (tidak kaku). Fleksibilitas mencakup fleksibilitas peserta didik dalam memilih program pendidikan, serta fleksibilitas pendidikan dalam mengembangkan

program pembelajaran. Dalam konsep yang luas, evaluasi kurikulum merupakan proses komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan suatu nilai dari suatu objek. Keputusan evaluasi (*value Judgement*) tidak hanya didasarkan pada pengukuran (*quantitative description*), dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan (*qualitative description*). Baik yang didasarkan pada hasil pengukuran (*measurement*) maupun bukan pengukuran (*nonmeasurement*) pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program/kurikulum yang dievaluasi.¹²⁶

Dalam konteks Pendidikan Islam, evaluasi yang dilakukan paling tidak harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²⁷

1. Prinsip kesinambungan, artinya evaluasi terhadap pendidikan Islam harus dilakukan melalui berbagai prosedur dan tahapan, termasuk didalamnya evaluasi harian, evaluasi pokok dan/atau sub pokok bahasan dan sejenisnya, sehingga dapat dianalisis perkembangan hasil dan kendala yang dihadapi dengan mudah dan cepat.
2. Prinsip menyeluruh, artinya bukan hanya aspek hasilnya saja, tetapi juga pada aspek proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Evaluasi pada aspek hasil pembelajaran harus mencakup tiga hal pokok, yaitu: kognitif, psikomotorik dan afektif. Misalnya saja ketika kita ingin mengetahui hasil pembelajaran pendidikan sholat wajib, maka yang

¹²⁶ Rusman, "*Manajemen Kurikulum*" (Jakarta: Rajawali Press,2009), h. 94.

¹²⁷ Ahmad Syar'i, "*Filsafat Pendidikan Islam*", (Jakarta:Pustaka Firdaus,2005),h.88

dievaluasi bukan saja kemampuan/pengetahuan anak mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan shalat, tetapi juga termasuk bagaimana keterampilan bacaan dan gerakannya serta kesadaran dan kedisiplinannya dalam melaksanakan shalat wajib.

3. Prinsip objektif artinya evaluasi harus didasarkan kepada keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan tanpa ada diskriminasi dan kepentingan apapun.
4. Prinsip sistematis, dalam arti pelaksanaan evaluasi harus terencana, baik sasaran dan tujuannya, materi dan bidang garapannya maupun teknik dan penyelenggaraannya.

E. Model-Model Evaluasi Kurikulum

Model evaluasi muncul karena adanya usaha eksplanasi secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak, termasuk pada bidang ilmu pendidikan.¹²⁸ Perkembangan model evaluasi termasuk suatu fenomena yang menarik. Setelah Tyler mengemukakan model *black box* tahun 1949, belum terlihat ada model lain yang muncul ke permukaan. Lebih kurang sepuluh tahun lamanya, orang-orang yang melakukan kegiatan evaluasi hanya menggunakan model evaluasi tersebut. Evaluasi lebih banyak diarahkan kepada dimensi hasil, belum masuk ke dimensi-dimensi lainnya.¹²⁹

¹²⁸ Sukardi , *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) , hlm.34

¹²⁹ Zainal Arifin, "Evaluasi Program: Model-Model Evaluasi" , *Makalah*, UPI tahun 2010.

Menurut Fernandes dalam Suharsimi Arikunto pemikiran secara serius tentang evaluasi program dimulai sekitar tahun delapan puluhan. Sejak tahun 1979-an telah terjadi perkembangan sehubungan dengan konsep-konsep yang berkenaan dengan evaluasi program, sebagai contoh teori yang dikemukakan oleh *Cronbach* tentang pentingnya sebuah rancangan dalam kegiatan evaluasi program.¹³⁰ Berikut ini disajikan tabel yang memuat beberapa model evaluasi.

Beberapa Model Evaluasi

Nama Model	Penekanan dalam Penilaian
1. <i>Goal Oriented Model</i> atau <i>Model Tyler</i>	Evaluasi ditekankan tercapainya tujuan pada perkembangan dan efektivitas inovasi pendidikan.
2. Evaluasi berorientasi pada keputusan	Evaluasi ditekankan pada memfasilitasi pertimbangan cerdas terhadap pembuatan keputusan yang ditentukan.
3. Penilaian Transaksional	Evaluasi ditekankan pada penjabaran dan penerangan proses dan nilai perspektif subjek kunci.
4. <i>Advisory</i>	Evaluasi ditekankan pada kasus komparatif yang dihadirkan untuk mendapatkan informasi

¹³⁰ Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan ...*, hlm.5.

<i>Evaluation</i>	unggulan program yang diambil.
5. Evaluasi Sumatif dan Formatif	Evaluasi formatif merupakan evaluasi dengan tujuan peningkatan mutu layanan, sedangkan evaluasi sumatif memiliki tujuan yang berkaitan dengan tingkatan kompetensi yang dicapai para lulusan.

Sumber: Sukardi, *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

Dewasa ini, dengan banyaknya penelitian dan penemuan berbagai model Evaluasi, maka muncul model- model lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan dari suatu program antara lain:¹³¹

1. Model Evaluasi Kirkpatrick, dikembangkan oleh Kirkpatrick
2. *Logic Model*, dikembangkan oleh Ladewig, 1998
3. Responsive Illuminatif Penerangan, dikembangkan oleh Parlett dan Hamilton
4. MAUT (*Multiatribut Utility Method*), dikembangkan oleh Dyer, Fishburn, Steuer, Wallenius & Zionts, 1992).
5. ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implement, Evaluation*), dikembangkan oleh Dick & Carey

¹³¹ Marni Serepinah, “ Kebermaknaan Evaluasi Program Pendidikan “, dalam *Jurnal Pendidikan Penabur* edisi no. 20, Vol. XII, 2013.

6. AKIP (Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999
7. CIRO (Model Evaluasi yang digunakan dalam pelatihan), Warr, Bird, and Rackham (1979)
8. Model Evaluasi *Benchmarking* dikembangkan dalam Watson, 1994
9. Model EKOP (Evaluasi Kualitas dan Output Pembelajaran), dimodifikasi oleh Kirkpatrick
10. *Theory-driven Evaluation* Model, dikembangkan oleh Huey Tsyh Chen
11. Model Brinkerhoff, dikembangkan oleh Brinkerhoff
12. Model Evaluasi Semu, dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam (1999).
13. Model CONNOISSEURSHIP atau model AHLI, dikembangkan oleh Esner (1975).¹³²

Untuk evaluasi kurikulum ada beberapa model evaluasi yang dapat diaplikasikan antara lain:

1. Model CIPP atau *context, input, process* dan *product*. Model CIPP merupakan hasil kerja para tim peneliti yang tergabung dalam suatu organisasi komite Phi Delta Kappa USA yang ketika itu diketuai oleh Stufflebeam. Model CIPP ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam evaluasi sistem dengan analisis yang berorientasi pada perubahan terencana.¹³³ Evaluasi ini bersifat menyeluruh, seluruh komponen dari kurikulum dievaluasi. Dari sisi context yaitu tujuan dari kurikulum serta hubungannya dengan

¹³².Sukardi, *Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Oprasionalnya*,(Jakarta: Bumi Aksara,2011) ,hlm.62.

¹³³.Sukardi, *Evaluasi Pendidikan : Prinsip dan Oprasionalnya*,(Jakarta: Bumi Aksara,2011) ,hlm.62-63.

harapan masyarakat, dari sisi input yang dievaluasi yaitu siswa dan guru, sarana prasarana, rancangan pembelajaran, dan lain-lain. dari sisi proses yang dievaluasi yaitu aktivitas belajar mengajar siswa dan guru, serta evaluasi product yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi model CIPP pada garis besarnya melayani empat macam keputusan,

- ✓ Perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus.
- ✓ Keputusan pembentukan atau structuring, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan.
- ✓ Keputusan implementasi, dimana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih.
- ✓ Keputusan pemutaran (*recycling*) yang menentukan jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau dihentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.¹³⁴

2. Model diskrepensi (*Discrepancy Model*) dengan menilai *discrepancy* atau kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan.
3. *Stake*, mengembangkan model kontingensi-kontingensi (*contingency-congruence Model*).

¹³⁴.Sukardi, *Evaluasi Pendidikan : Prinsip ...* , hlm.62-63.

Model ini pada prinsipnya juga membandingkan yang diharapkan dengan yang dilaksanakan, tetapi selanjutnya para pelaksana kurikulum membuat rancangan untuk mendekati harapan dan pelaksanaan tersebut sehingga cocok/sesuai dengan kegiatan belajar siswa.

David Cohen (1977) mengidentifikasi tiga skema model evaluasi kurikulum:

1. The Curriculum Materials Analysis Scheme (CMAS) /Skema Analisis Bahan Kurikulum yang dikembangkan oleh Konsorsium Pendidikan Ilmu Sosial.
2. Skema Sussex untuk analisis materi kurikulum yang dikembangkan di Universitas Sussex.
3. The Curriculum Materials Analysis Scheme (CMAS) / Skema Analisis Materi Kurikulum untuk Sains yang dikembangkan di Republik Federal Jerman.

Ada beberapa model evaluasi yang sering disebut dalam literatur evaluasi.¹³⁵

1. Tyler's objective-oriented model
2. Societal experimentation model
3. CIPP model and the EIPOP model
4. Countenance evaluation
5. Discrepancy evaluation model
6. Responsive evaluation
7. Transactional evaluation
8. Goal-free evaluation
9. Investigative approaches to evaluation
10. Evaluation as illumination
11. Evaluation as connoisseurship
12. The advocacy model of evaluation
13. Participating evaluation model
14. The situation-specific strategy model.

¹³⁵. Print, M, *Curriculum Development and Design* (Sydney: National library of Australia cataloging in-publication entry, 1993), p.164.

BAB VI

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum memiliki banyak pengertian sebagaimana kita lihat para ahli ilmu pendidikan dan kurikulum mencoba untuk mendefinisikannya.

- 1) Menurut pendapat *Oemar Hamalik*,¹³⁶ pengembangan kurikulum adalah sebuah perencanaan untuk menghadirkan kesempatan belajar kepada siswa dengan maksud dan tujuan agar terjadi perubahan serta memberikan penilaian sampai dimana perubahan itu terjadi pada diri siswa tersebut.
- 2) Pendapat lain menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang direncanakan dengan adanya pengaruh positif baik dari luar maupun dari dalam, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik.¹³⁷
- 3) Pengembangan kurikulum atau disebut dengan *curriculum development* pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu

¹³⁶.Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung:Remaja Rosdakarya,2008), h.97.

¹³⁷.Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*,(Jakarta: Bumi Aksara,2010), h.91.

- bentuk kurikulum yang dianggap ideal.¹³⁸
- 4) Pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu.¹³⁹

Adapun yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah sebuah proses untuk memaksimalkan implementasi kurikulum pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan Islam yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam periode waktu tertentu serta memberikan penilaian berkelanjutan terhadap respon dan perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai objek pendidikan sampai didapatkan bentuk kurikulum pendidikan Islam yang dianggap ideal.

Pengembangan kurikulum menjadi sebuah kebutuhan dalam dunia pendidikan di era di mana zaman berubah dengan cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Tentunya lingkungan pendidikan juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kurikulum sebagai acuan dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik baik di dalam maupun di luar kelas diharapkan seiring dan sejalan dengan tumbuh kembang anak didik mengingat pertumbuhan serta kebutuhan anak didik sangat beragam. Pelayanan pendidikan serta kesempatan belajar yang didapatkan oleh anak didik harus benar-

¹³⁸.Sukiman. *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya,2015)h. 5-6.

¹³⁹.Syafaruddin dan Amiruddin, *Manajemen Kurikulum*,...h 101

benar baik. Maka, disinilah peran pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang paling penting. Dalam pengembangan suatu kurikulum tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak diantaranya administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orangtua murid serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak tersebut yang secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah: admistrator, guru, dan orangtua.¹⁴⁰

Menurut *Hamalik* yang dikutip oleh *Wahyudin*, pengembangan Kurikulum dapat dilakukan melalui pendekatan fungsi manajemen yang artinya seluruh proses kegiatan pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

- 1) perencanaan kurikulum;
- 2) pengorganisasian;
- 3) implementasi kurikulum;
- 4) ketenagaan dalam pengembangan kurikulum;
- 5) kontrol kurikulum yang mencakup evaluasi kurikulum;
- 6) mekanisme pengembangan kurikulum secara menyeluruh.

Keenam fungsi manajemen pengembangan kurikulum di atas merupakan tahap-tahap dari proses manajemen pengembangan kurikulum.¹⁴¹

Dalam kajian ini dipahami bahwa kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan,

¹⁴⁰.Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung:Remaja Rosdakarya,2013)h.155.

¹⁴¹.Dinn Wahyudin, *Majemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 73.

penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirilah kegiatan pengembangan tersebut. Pengertian pengembangan sebagaimana dimaksud berlaku pula dalam bidang kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup kegiatan penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. Bila kurikulum itu sudah dianggap cukup matang, setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirilah tugas pengembangan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan.

Istilah pengembangan kurikulum mencakup dimensi yang luas. Itu artinya pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, penerapan, dan evaluasi karena pengembangan kurikulum menunjukkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Peningkatan kurikulum sering digunakan bersinonim dengan pengembangan kurikulum meskipun dalam beberapa kasus dipandang sebagai hasil pengembangan setelah dilakukan evaluasi kurikulum dan kemudian dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Biasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan

evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan, bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik.

B. Peluang Pengembangan Kurikulum

Tantangan terberat lingkungan pendidikan nasional adalah cepatnya dinamika lingkungan global, perkembangan sains dan teknologi, perubahan nilai, perubahan kebutuhan hidup, diferensiasi pekerjaan, dan kompetisi antar bangsa.¹⁴² Di sisi lain, permasalahan pendidikan Indonesia yang aktual, mendesak, berdampak nasional terutama yang berkaitan dengan kualitas lulusan, kualifikasi tenaga pendidik, dan kependidikan, perkembangan kurikulum, tata kelola keuangan, manajemen institusional, ketersediaan dan kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan. Proses pembelajaran yang kurang interaktif, kurang inspiratif, membosankan, kurang menantang, kurang memberi motivasi kepada peserta didik, untuk berpartisipasi secara aktif, kurang dapat menumbuhkan prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat dan perkembangan peserta didik, serta kurang memberikan keteladanan juga menjadi permasalahan tersendiri. Sebagian tenaga pendidik juga kurang jelas dalam menentukan tugas pembelajaran seperti materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.¹⁴³ Begitu juga dengan banyaknya penganggur terdidik, pengangguran tenaga terdidik juga

¹⁴².H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta:RinekaCipta,2014), h.6.

¹⁴³.Abuddin Nata,*Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada,2012), h.331.

menimbulkan akibat- akibat sosial lebih kompleks, seperti kenakalan, kegelisahan, kemiskinan, kriminalitas, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sebagai ciri masyarakat yang kurang mandiri.¹⁴⁴

Dengan perubahan zaman, maka tuntutan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi keniscayaan dalam tatanan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana halnya perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan diubah menjadi kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik merupakan keniscayaan di tengah perubahan global terutama dalam konteks eksistensi dan kemajuan bangsa. Pengembangan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutu pendidikan, serta tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan yang dijalankan melalui proses *input* (masukan), proses, *output* (keluaran) dan *outcomes* (hasil). Interaksi sumberdaya dengan proses yang tertata dengan baik diharapkan akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Untuk menghasilkan pendidikan bermutu, suatu lembaga pendidikan perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pelanggan utamanya adalah peserta didik dan pelanggan selanjutnya adalah pengguna hasil pendidikan antara lain adalah masyarakat dan pemerintah.¹⁴⁵ Disinilah peluang besar pengembangan kurikulum untuk menghasilkan bentuk kurikulum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan serta sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan kurikulum harus melibatkan pemikiran-pemikiran secara falsafati, psikologi, ilmu

¹⁴⁴.Ace Suryadi, *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*,(Bandung: Rosdakarya,2014), h.11.

¹⁴⁵.Martini Jamaris. (2013). *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h.10.

pengetahuan, teknologi dan budaya. Landasan filsafati pendidikan menelaah fungsi kurikulum secara mendalam dan radikal sehingga menemukan sifat yang hakiki (*substantive nature*). Sedangkan landasan psikologis berperan untuk menelaah keselarasan antara perkembangan serta kesiapan mental dan fisik peserta didik dengan kompleksitas materi pelajaran sehingga proses pembelajaran dan pendidikan menghasilkan pembelajaran dan pendidikan yang bermanfaat selaras dengan cita-cita peserta didik. Sementara ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya merupakan sumber-sumber materi pelajaran yang perlu diatur penyampaianya, baik pada arah horizontal, (cakupan, atau *scopes*) maupun pada arah vertikal (kontinuitas, *skuens*) agar dapat menumbuhkan kemampuan menalar dengan wawasan yang luas dan mendalam.¹⁴⁶

Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan keilmuan dalam rangka memastikan bahwa pengembangan kurikulum harus menjadi kebijakan pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota. Bahkan kebijakan sekolah secara mikro dapat mengusahakan pengembangan kurikulum, terutama untuk mendisain keunggulan sekolah, baik proses layanan maupun lulusan yang diharapkan *stakeholders* pendidikan.

C. Kebijakan Pembaharuan Kurikulum

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis dan terarah dan tidak asal berubah.

¹⁴⁶.Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan: Teknologi dan Kejuruan*, (Bandung: Adytama,2010) h.3.

Kebijakan reformasi pendidikan meniscayakan perubahan atau pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari kebijakan pendidikan.¹⁴⁷

Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang mengemuka ke permukaan dalam realitas sosial. Sudah sepatutnya kalau kurikulum itu terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan, dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap hidup dalam berbagai keadaan di masa depannya. Kurikulum harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak *overload* dan mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi.¹⁴⁸ Di sinilah peluang untuk melakukan pengembangan kurikulum dengan memperhatikan faktor kebutuhan anak secara internal dan faktor perubahan lingkungan eksternal, terutama kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai kehidupan. Kebudayaan bangsa menjadi bagian pokok dari isi kurikulum, meskipun dalam wujud pengetahuan, nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan dan pengembangan kurikulum harus memiliki visi dan arah yang jelas mau dibawa ke mana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut.¹⁴⁹ Menurut Kunandar,¹⁵⁰ kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Oleh karena itu,

¹⁴⁷.Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014) h.38.

¹⁴⁸.Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi KTP dan Sukses Sertifikasi*,(Jakarta: Rajawali Press,2011), h.113.

¹⁴⁹.E.Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), h.59.

¹⁵⁰. Kunandar *Guru Profesional: Implementasi KTP dan Sukses Sertifikasi*,(Jakarta: Rajawali Press,2011),h.113.

kurikulum jangan sampai membebani peserta didik, seperti beban belajar yang terlalu berat. Dalam kaitan pembaharuan kurikulum, Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas berpendapat bahwa salah satu upaya peningkatan mutu kurikulum adalah dengan pembenahan kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal (*minimal basic skill*). Menerapkan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis dan mandiri bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum suatu keniscayaan.¹⁵¹

Kurikulum pendidikan nasional harus dikembangkan berdasarkan beberapa indikator, sebagaimana dikemukakan Kunandar,¹⁵² yaitu:

1. *Pertama*, kurikulum pendidikan harus bersifat luwes, sederhana dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan dimasa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Idealnya kurikulum harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat sehingga kurikulum (dunia pendidikan) tidak tertinggal dari dinamika masyarakat. Kurikulum harus dikembangkan secara futuristik dan mampu menjawab tantangan zaman.
2. *Kedua*, kurikulum harus bersifat pedoman pokok (*general guideline*) kegiatan pembelajaran siswa. Kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara keadaan sumber daya pendukung, dan kondisi daerah setempat. Kurikulum hanya memberikan yang fundamental. Pengembangan yang sesuai dengan tuntutan

¹⁵¹. Kunandar *Guru Profesional: Implementasi KTP dan Sukses Sertifikasi*, (Jakarta: Rajawali Press,2011), h.114-115.

¹⁵². *ibid.* h.115-116

waktu dan tempat dicari sendiri oleh sekolah (guru) masing-masing dengan memperhatikan dan memanfaatkan karakteristik dan kearifan lokal. Dalam kaitan ini dibutuhkan profil guru yang memahami hakikat pendidikan dan mampu membaca keadaan, serta memiliki jiwa kreatif, inovatif dan berwawasan luas. Prinsip kurikulum seperti ini sangat relevan mengingat perubahan yang ada dalam masyarakat begitu cepat sehingga banyak hal menjadi cepat usang.

3. *Ketiga* pengembangan kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar (buku dan lembar kerja peserta didik) dan media atau alat pembelajaran. Pengembangan sistem satu paket ini akan mengurangi kecenderungan deviasi tujuan pokok-pokok bahasan yang diajarkan, karena selama ini ketiga komponen penunjang pembelajaran tersebut dikembangkan secara terpisah.
4. *Kempat*, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global dan regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Dengan demikian, kualitas kurikulum pendidikan setara dengan negara-negara lainya yang mempunyai wawasan keunggulan, namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda-beda.
5. *Kelima*, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satuan dan jenjang pendidikan di atasnya. Dengan demikian, kurikulum satu satuan pendidikan merupakan landasan yang kokoh bagi kurikulum pada satuan pendidikan selanjutnya.
6. *Keenam*, pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat tetapi merupakan *shared activity* dengan pemerintah

daerah, bahkan komunitas. Ke depan pemerintah cukup menangani kurikulum pendidikan yang sifatnya inti (*core curriculum*), yang umumnya meliputi: matematika, IPA dan Bahasa, sedangkan kurikulum yang meliputi *exanted* disusun dan dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya.

7. *Ketujuh*, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya dapat dibedakan untuk kelompok anak rata-rata, baik karena faktor bawaan atau karena faktor ketersediaan sumber daya pendukung. Pemberlakuan kurikulum yang berbeda ini juga menuntut cara perbedaan cara mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran untuk setiap kelompok anak tersebut.
8. *Kedelapan*, kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Pendidikan di sekolah jelas akan sulit tercapai tanpa dukungan pendidikan di keluarga dan masyarakat. Ketiga komponen (sekolah, keluarga dan komunitas) tersebut menjadi pilar pendidikan sehingga kegiatan dan proses pendidikan merupakan *shared activity* dari ketiga pilar pendidikan tersebut.

Kedelapan indikator tersebut harus dicermati sehingga para pengambil kebijakan dan pelaksananya dapat menjadi indikator tersebut dalam memaksimalkan upaya pengembangan atau perubahan kurikulum ke arah yang lebih baik, terutama suatu kurikulum yang mampu menjadi pedoman pendidikan dan pembelajaran di satu sisi dan sesuai dengan kebudayaan bangsa, dan mampu memenuhi kebutuhan anak didik untuk

memaksimalkan kecerdasannya, baik kecerdasan intelektual, spiritual, estetika, dan kecerdasan emosional dan sosial. Dengan begitu kurikulum yang terus dikembangkan diharapkan mampu merespon dinamika kemajuan sains dan teknologi, dengan tetap konsisten dengan nilai agama dan moral bangsa, sekaligus memenuhi keperluan anak untuk hidup dalam zaman yang berbeda.

D. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum

Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu dibangun fondasi yang kokoh.

Hasil evaluasi kurikulum sejatinya memerlukan pengembangan atau bahkan perubahan kurikulum pendidikan. Itu artinya hasil evaluasi kurikulum meniscayakan upaya mengembangkan kurikulum. Menurut Sukiman, setiap pengembangan kurikulum hendaknya menggunakan landasan yang kuat sehingga akan melahirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang dimaksud dengan landasan kurikulum di sini adalah bidang-bidang yang dapat dijadikan dasar pokok keputusan tentang kurikulum karena berdasarkan landasan-landasan tersebut dapat dijawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti:

- 1) Bagaimanakah tujuan hidup manusia,
- 2) Hal-hal apakah harus diajarkan kepada generasi muda agar dapat membimbing mereka menuju kehidupan yang baik;

- 3) Seberapa jauh peranan dan tanggungjawab sekolah dalam hal ini,
- 4) Relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dan struktur masyarakat,
- 5) Peranan teknologi dan struktur keluarga terhadap praktik kependidikan disekolah,
- 6) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia jalur pendidikan di sekolah, dan
- 7) Relevansi struktur kurikulum dengan tahap-tahap perkembangan kedewasaan anak didik, dan masih banyak lagi pertanyaan yang relevan.

Pengembangan kurikulum sebagai bagian dari ilmu pendidikan meniscayakan adanya keinginan atau inisiatif para pengelola pendidikan untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan perubahan internal dan eksternal dunia pendidikan. Semua segmen *stakeholders* pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia usaha dan industri) khususnya pengguna jasa lulusan menjadi faktor yang harus diperhatikan kebutuhannya terhadap pendidikan yang disediakan para pengelola pendidikan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan program sampai kepada evaluasi program kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.¹⁵³

Melalui kajian terhadap bidang-bidang yang menjadi landasan pengembangan kurikulum ini, hal-hal yang bersifat normatif dan ideal yang menjadi tumpuan tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat dianalisis, dan ini sangat bermanfaat untuk mencegah agar program

¹⁵³.Zainal Arifin,*Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012) h.25.

pendidikan yang lahir tidak mudah goyah dan berubah-ubah karena rapuhnya pondasi yang mendasarinya.¹⁵⁴ Dalam perkembangannya bidang studi pengembangan kurikulum dewasa ini telah diakui sebagai ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, pengetahuan tentang pengembangan kurikulum harus dapat digunakan untuk menciptakan kurikulum bidang studi pada jenjang pendidikan tertentu yang efektif. Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus berorientasi kepada kebutuhan bidang studi dan jenjang pendidikan tertentu serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik.¹⁵⁵

Menurut James A. Beane, et al, ada tiga fondasi atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filsafat, sosiologi dan psikologi. Senada dengan ini, Nana Sudjana menyebutkan adanya tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya, dan landasan psikologis. S. Nasution menambahkan satu lagi, yaitu landasan organisatoris, serta ada pula yang menambahkan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi juga landasan agama sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang paling esensial. Landasan –landasan pengembangan kurikulum diuraikan sebagai berikut:

- 1) Landasan Filosofis Landasan filosofis dimaksudkan, pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara manusia, terutama antara pendidik dan

¹⁵⁴.Sukiman, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya,2015), h. 25-26

¹⁵⁵.Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan*, (Bandung: Refika Aditama,2010), h.7.

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam interaksi tersebut banyak persoalan yang bersifat mendasar, seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang mendasar yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis.

- 2) Landasan Psikologis, Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan secara umum terdiri empat unsur, yaitu, tujuan, materi atau bahan pelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian. Menurut S. Nasution, landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan, terutama dalam:
 - seleksi dan organisasi bahan pelajaran,
 - menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, dan
 - merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai.
- 3) Landasan Sosial Budaya, Landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat dan budaya. Di sini ada hubungan timbal balik yang harmonis antara pendidikan, masyarakat dan budaya.

- 4) Landasan Agama Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam, yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran-ajaran agama yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Dari sumber-sumber inilah aspek-aspek atau unsur-unsur pendidikan dikembangkan, seperti perumusan tujuan pendidikan, materi dan strategi pelaksanaannya.
- 5) Landasan Organisatori Landasaan ini berkenaan dengan masalah, dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan dan disajikan?. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang dikerjakan misalnya dalam bentuk broad-field. Ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran, jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Tidak sedikit jenis organisasi kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli kurikulum. S. Nasution mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi dua kelompok besar, yaitu: 1) Kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*), yang meliputi: a) Kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah (*separate subject curriculum*) b) Kurikulum mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*) 2) Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), yang diantara lain meliputi a) Kurikulum inti (*core curriculum*) b) Kurikulum pengalaman (*activity*)

curriculum)¹⁵⁶ Bagaimanapun, Jenis organisasi yang akan digunakan biasanya dipengaruhi oleh aliran psikologi (khususnya psikologi belajar) yang dianut. Perlu dipahami di sini bahwa tidak ada jenis organisasi kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan atau kelebihan, tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi-segi tertentu. Selain itu bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah bahkan dapat membantu atau melengkapi yang satu dengan yang lain.

- 6) Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi tidak dapat dihindari. Adaptasi terhadap fakta ini membuat manusia harus siap dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Begitu juga dengan kurikulum yang harus adaptif terhadap situasi yang ambigu dan serta antisipatif terhadap ketidakpastian.

E. Pihak–Pihak Yang Terlibat dalam Proses Pengembangan Kurikulum

Sementara menurut Sukmadinata, dalam pengembangan kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orangtua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus menerus terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator, guru, dan orangtua.

- 1) Pertama, peranan administrator pendidikan. Para

¹⁵⁶.Sukiman. *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya,2015),h. 33.

administrator pendidikan ini terdiri atas: direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan serta kepala sekolah. Peranan para administrator ditingkat pusat (direktur dan kepala pusat) dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum *course* yang dituntut.¹⁵⁷ Pemerintah pusat, atau administrator tingkat pusat bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi di Perguruan Tinggi serta meminta persetujuannya terutama dalam menyusun kurikulum sekolah dalam memajukan peradaban bangsa. Bertolak dari kerangka dasar dan program inti tersebut para administrator daerah (kepala kantor wilayah) dan administrator lokal (kabupaten, kecamatan dan kepala sekolah) mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Para kepala sekolah mempunyai wewenang dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah. Para kepala sekolah ini, sesungguhnya yang secara terus menerus terlibat dalam mengembangkan kurikulum sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya sering harus didorong dan dibantu oleh para administrator. Administrator lokal harus bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan sistem pendidikan kepada masyarakat, serta mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di kelas. Peranan kepala sekolah lebih banyak berkenaan dengan

¹⁵⁷.Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung:Remaja Rosdakarya,2013) h, 155.

implemntasi kurikulum di sekolahnya. Kepala sekolah juga mempunyai peranan kunci dalam menciptakan kondisi untuk pengembangan kurikulum di sekolahnya. Ia merupakan figur kunci di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi suasana sekolah dan pengembangan kurikulum.

- 2) Kedua, peranan ahli. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Mengacu pada kebijakan- kebijakan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijakan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat, dan masukan-masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan, para ahli pendidikan dan kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan di atas. Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan metode magajar, tetapi meyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan sistem dan model kurikulum, baik model konsep, model desain, model evaluasinya, serta berbagai perangkat dan pedoman penjabaran serta pedoman implemntasi dari model-model tersebut.
- 3) Ketiga, peranan guru, guru memegang peranan yang cukup penting baik didalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari

atas. Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan dikelasnya. Karena guru juga merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan maka guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Peranan guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar murid-murid dalam kelas, tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Hasil-hasil penilaian demikian akan sangat membantu pengembangan kurikulum, untuk memahami hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum dan juga dapat membantu mencari cara untuk mengoptimalkan kegiatan guru. Guru juga bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas dia juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, pencoba, penyusun, organisasi, manajer sistem pengajaran, pembimbing baik di sekolah maupun dimasyarakat dalam hubungannya dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Guru juga berperan sebagai pelajar dalam masyarakatnya, sebab ia harus selalu belajar struktur sosial masyarakat, nilai-nilai utama masyarakat, pola-pola tingkah laku dalam masyarakat. Hal-hal di atas diperlukan untuk mempersiapkan guru dalam berbagai situasi dan kagiatan pendidikan.

- 4) Keempat, peranan orang tua murid. Orang tua yang juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal: pertama dalam menyusun kurikulum dan kedua dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua dapat ikut serta, hanya terbatsa pada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Peranan orang tua lebih besar dalam pelaksanaan

kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat erat antara guru atau sekolah dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah dan sebagainya. Rapor juga merupakan suatu alat komunikasi tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, lokakarya, seminar, pertemuan orang tua, guru, pameran sekolah dan sebagainya.¹⁵⁸

Pengembangan kurikulum berdasarkan manajemen, berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berlandaskan pola pikir manajemen, atau berdasarkan proses manajemen sesuai fungsi-fungsi manajemen.¹⁵⁹ Rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan. Aktivitas manajemen kurikulum/ pengajaran ini adalah kolaborasi kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bersama guru-guru melaksanakan kegiatan manajerial dalam memaksimalkan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks ini penyusunan dan pengembangan kurikulum menjadi tugas strategis bagi pengelola pendidikan, baik pihak pemerintah maupun

¹⁵⁸.Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung:Remaja Rosdakarya,2013) h. 157-158.

¹⁵⁹.Oemar Hamalik,*Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Remaja Rosdakarya,2008), h.133.

pihak swasta atau yayasan yang mengelola pendidikan formal di sekolah, pesantren dan madrasah.

Selain itu, menurut Hamalik ada beberapa faktor penting yang merupakan dasar pengembangan kurikulum yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- 1) Kebijakan nasional, khususnya yang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional.
- 2) Kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan dalam rangka merealisasikan Undang-undang (sisdiknas nomor 20 tahun 2003) yang menyebutkan kurikulum menempati kedudukan sentral.
- 3) Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan memenuhi keperluan sistem pendidikan dalam upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menciptakan IPTEK.
- 4) Kebutuhan, tuntutan, aspirasi dan masalah dalam sistem masyarakat yang bersifat dinamis, dan berubah dengan cepat dewasa ini dan masa akan datang.
- 5) Profesionalisasi dan fungsionalisasi ketenagaan bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkualitas dan mampu bekerjasama dengan unsur ketenagaan profesi lainnya.
- 6) Upaya pembinaan disiplin ilmu pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin ilmu lainnya, serta pembinaan ilmu pendidikan pada khususnya.

Lebih rinci, Oemar Hamalik mengemukakan beberapa dasar yang harus dipertimbangkan dalam

pengembangan kurikulum, yaitu:

- 1) Kurikulum disusun untuk mewujudkan sisdiknas.
- 2) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan.
- 3) Kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.
- 4) Kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- 5) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdivertifikasi, sesuai dengan kebutuhan potensi, dan minat peserta didik serta tuntutan pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan.
- 6) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tuntutan pembangunan daerah dan nasional, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan serta kebutuhan pengembangan iptek dan seni.
- 7) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi, sesuai tuntutan lingkungan dan budaya setempat.
- 8) Kurikulum pada semua jenjang pendidikan mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola hidup sehat, estetika dan rasa kebangsaan.

F. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut.¹⁶⁰

¹⁶⁰.Hafni Ladjid, *pengembangan kurikulum*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm. 9

Untuk melakukan tindakan pengembangan kurikulum sebagai pekerjaan yang sistematis, maka perlu dipedoman sejumlah prinsip pengembangan kurikulum. Sukmadinata mengelompokkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ke dalam dua hal, yakni prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus.¹⁶¹

a) Prinsip Umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum:

- 1) Prinsip relevansi Secara umum istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan ke luar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian.
- 2) Prinsip fleksibilitas Fleksibilitas ini artinya lentur/tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru.

¹⁶¹.Abdul Rohman, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Semarang: CV. Karya abadi Jaya, 2015), hlm. 100

- 3) Prinsip kontinuitas Prinsip kontinuitas yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antar satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.
 - 4) Prinsip praktis Yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal tetapi juga praktis.
 - 5) Prinsip Efektifitas Dalam sajian bidang pendidikan prinsip efektifitas ini dikaitkan dengan efektifitas guru mengajar dan efektifitas para murid belajar. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma.
- b) Prinsip Khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum:
- 1) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu

pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tujuan khusus).

- 2) Prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal :
 - Perlu penjabaran tujuan pendidikan/ pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana
 - Isi bahan harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
 - Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis
- 3) Prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Apakah metode/teknik belajar-mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran?
 - Apakah metode/teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa?
 - Apakah metode/teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat?
 - Apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor?
 - Apakah metode/teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa, atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya?

- Apakah metode/teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru?
 - Apakah metode/teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber yang ada dirumah dan di masyarakat?
 - Untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan “learning by doing” di samping “learning by seeing and knowing”.
- 4) Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar-mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat:
- Alat/media pengajaran apa yang diperlukan. Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada apa penggantinya?
 - Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan: bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiyaannya, waktu pembuatan?
 - Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain?
 - Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multi media.
- 5) Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran :
- Dalam penyusunan alat penilaian (test) hendaknya mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut: Rumusan

tujuan-tujuan pendidikan yang umum, dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Uraikan ke dalam bentuk tingkah-tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pelajaran. Tuliskan butir-butir test.

- Dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal : Bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan ditest? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan test? Apakah test tersebut berbentuk uraian atau objektif?
- Dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil test? Apakah digunakan formula guessing? Bagaimana pengolahan skor? Skor standar apa yang digunakan? Untuk apakah hasil-hasil test digunakan?

Menurut Sukiman, dalam pengembangan kurikulum terdapat sejumlah perinsip umum yang dipakai sebagai rambu-rambu atau pedoman agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan keinginan yang diharapkan semua pihak yakni peserta didik sendiri, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan juga pemerintah. Adapun prinsip-prinsip umum tersebut dapat dikemukakan yaitu:

- 1) Prinsip Berorientasi pada Tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan dimaksudkan agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan

mengacu pada tujuan yang akan dicapai. menilai mutu dan efisiensi pengajaran.

- 2) Prinsip Relevansi Dalam pengembangan kurikulum, prinsip relevansi yang dimaksud adalah, adanya hubungan, kaitan, kesesuaian, atau keserasian antar unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat
- 3) Prinsip Efektivitas, Efektivitas merupakan suatu kegiatan berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.
- 4) Prinsip Efisiensi, Prinsip efisiensi adalah berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dijalankan atau biaya yang dikeluarkan.
- 5) Prinsip Kontinuitas (kesinambungan) Kesenambungan dimaksud adanya semacam hubungan yang saling menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan terutama mengenai tujuan dan bahan pembelajaran. Kontinuitas ini dapat dilihat dari segi :
 - a) Kontinuitas antara Berbagai Tingkat Lembaga Pendidikan Dalam pengembangan kurikulum, hendaknya dipertimbangan hal-hal berikut ini:
 - pertama, kemampuan/kompetensi dan bahanbahan pelajaran yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya. Misalnya, pada tingkat Sekolah Dasar, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi harus ada kesinambungan kurikulum secara

hierarkis fungsional menurut bidang telaaahnya masing-masing.

- Kedua, kemampuan kompetensi dan bahan-bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat lembaga pendidikan yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

b) Kontinuitas antara Berbagai Mata Pelajaran Kompetensi dan bahan yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran sering mempunyai hubungan satu sama lainnya. Untuk itu, urutan dalam penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diupayakan agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Misalnya, untuk memahami tentang mawaris (warisan) dalam mata pelajaran agama, sebelumnya perlu memahami mata pelajaran matematika.

- 6) Prinsip Fleksibilitas, Prinsip fleksibilitas maksudnya adalah, hendaknya kurikulum memiliki sifat lentur dalam arti ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak bagi guru/pendidik dan peserta didik. Fleksibilitas bagi peserta didik diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam memilih program pendidikan, dan fleksibilitas bagi guru adalah dalam bentuk pengembangan program pembelajaran. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat dibentuk jurusan/program spesialisasi ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih peserta didik atas dasar kemampuan dan minatnya.
- 7) Prinsip Belajar Seumur Hidup, Prinsip belajar seumur hidup (*long life learning*) merupakan

konsep pendidikan yang mengarah pada ide pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mempunyai kesadaran dan kemauan untuk selalu membuka diri, mengembangkan kemampuan dan kepribadian melalui kegiatan belajar. Tidak harus terikat dengan sistem pendidikan sekolah (pendidikan formal), melainkan secara belajar mandiri sepanjang hidup.

- 8) Prinsip Sinkronisasi, Prinsip Sinkronisasi dimaksudkan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Kegiatan-kegiatan kurikuler yang diinginkan, bukan saling menghambat kegiatan kurikuler yang lain sehingga dapat mengganggu keterpaduan. Kurikulum sebagai suatu sistem komponen-komponen kurikulum harus bersifat padu dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan keterpaduan semua komponen yang ada dalam sistem itu, semua kegiatan yang diarahkan oleh satu komponen dengan yang lain tidak bertentangan kurikulum yang bersifat sinkron, pada gilirannya, akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.¹⁶²

Sementara itu, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Hamalik (2002) adalah sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada tujuan, artinya pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁶². Sukiman, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya, 2015), h. 40

- 2) Relevansi (kesesuaian) artinya pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan sistem penyampaianya harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Efisiensi dan efektivitas, artinya pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam pendayagunaan daya, waktu, tenaga dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal.
- 4) Fleksibilitas (keluwesan) artinya kurikulum haruslah luwes, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku.
- 5) Berkesinambungan (kontinuitas), artinya kurikulum disusun secara berkesinambungan dimana bagian-bagian, aspek-aspek, materi dari bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan peserta didik.
- 6) Keseimbangan, artinya penyusunan kurikulum harus memerhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan sub-program, antara semua mata ajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktek, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial humaniora dan keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan

tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh.

- 7) Keterpaduan, artinya kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilingkungan sekolah maupun pada tingkat inter-sektoral.

- 8) Mutu, artinya pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas.

Isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.
2. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan mementingkan

keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal dan pengembangan diri secara terpadu serta disusun dalam berkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan
6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan,

dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan atau pengembangan kurikulum bukanlah pekerjaan yang mudah atau sederhana.

Depdiknas menyarankan untuk melakukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran perlu mengikuti prinsip-prinsip pengembangan. Prinsip prinsip pengembangan kurikulum dan pembelajaran antara lain:¹⁶³

- 1) Harus mencapai tujuan falsafah pendidikan sekolah dan nasional.
- 2) Dikembangkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada standar yang ditetapkan,
- 3) Perlu dikembangkan dari tingkat “akar rumput” dengan melibatkan kontribusi orang tua dan masyarakat.

¹⁶³.Departemen Pendidikan Nasional. *Manajemen Sekolah*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan pelatihan Pegawai, 2008.), hal 258

- 4) Perlu memberikan peluang memenuhi kebutuhan peserta didik untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- 5) Perlu mempertimbangkan budaya, kebiasaan, dan tradisi lokal, serta perlu menyediakan pengalaman pendidikan praktis.

G. Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Menurut Wahyudin, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum¹⁶⁴. Wahyudin berpendapat jika dilihat dari cakupan pengembangannya ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, pendekatan *top down* atau pendekatan administratif, yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah; dan kedua adalah pendekatan *grass root*, atau pengembangan kurikulum yang diawali oleh inisiatif dari bawah lalu disebarluaskan pada tingkat atau skala yang lebih luas. Istilah singkatnya sering dinamakan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Berikut sekilas tentang kedua pendekatan tersebut.

- 1) Pendekatan *Top Down*, Dikatakan pendekatan *top down* karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para kepala kantor wilayah. Selanjutnya dengan menggunakan semacam garis komando, pengembangan kurikulum diteruskan ke bawah. Biasanya pendekatan ini banyak dipakai oleh

¹⁶⁴. Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.47

negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Dilihat dari cakupan pengembangannya, pendekatan *top down* bisa dilakukan, baik untuk menyusun kurikulum yang benar-benar baru ataupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Anggota tim biasanya terdiri dari pejabat yang ada di bawahnya, seperti para pengawas pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan bisa juga ditambah dengan para tokoh dari dunia kerja. Tugas tim pengarah ini adalah merumuskan konsep dasar, garis-garis kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan.
- Menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Anggota kelompok kerja ini adalah para ahli kurikulum, para ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, ditambah dengan guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Tugas pokok tim adalah merumuskan tujuantujuan yang lebih operasional, dari tujuan-tujuan umum, memilih dan menyusun *sequence* bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran dan alat untuk petunjuk evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum petunjuk evaluasi.
- Apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya

hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau revisi. Jika dianggap perlu, kurikulum itu diujicobakan atau dievaluasi kelayakannya oleh suatu tim yang ditunjuk para administrator. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan.

- Para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun itu¹⁶⁵.

2) Pendekatan *Grass Root*, Pemegang kebijakan kemudian turun ke stafnya atau dari atas ke bawah. Jadi, dalam model *grass root*, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Oleh karena sifatnya yang demikian, pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum. Dalam kondisi yang bagaimana kira-kira guru dapat berinisiatif memperharui/ menyempurnakan kurikulum dengan pendekatan semacam ini? Minimal ada syarat sebagai kondisi yang memungkinkan, yaitu:

- Manakala kurikulum itu benar-benar bersifat lentur sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbaharui atau menyempurnakan kurikulum yang sedang diberlakukan. Kurikulum yang bersifat kaku, yang hanya mengandung petunjuk dan persyaratan teknis sangat sulit

¹⁶⁵. Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h 48

dilakukan pengembangannya dengan pendekatan ini.

- Hanya mungkin terjadi manakala guru memiliki sikap profesional yang tinggi disertai kemampuannya yang memadai. Sikap profesional itu biasanya ditandai dengan keinginan untuk mencoba dan mencoba sesuatu yang baru dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Menurut Wahyudin, ada beberapa langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat dilakukan manakala menggunakan pendekatan *grass roots* ini.

- ✓ Menyadari adanya masalah. Pendekatan *grass roots* biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Misalnya dirasakan ketidakcocokan penggunaan strategi pembelajaran, atau masalah kurangnya motivasi belajar siswa sehingga kita merasa terganggu. Pemahaman dan kesadaran guru akan adanya suatu masalah merupakan kunci dalam *grass roots*. Tanpa adanya kesadaran masalah, tidak mungkin *grass roots* dapat berlangsung;
- ✓ Mengadakan refleksi. Kalau kita merasakan adanya masalah maka selanjutnya kita berusaha mencari penyebab munculnya masalah tersebut. Refleksi dikaji dengan mengkaji literatur yang relevan dengan masalah yang kita hadapi atau mengkaji sumber informasi lain misalnya melacak sumber-sumber internet atau melakukan diskusi dengan

teman sejawat dan mengkaji sumber dari lapangan, misalnya melakukan wawancara dengan siswa, orang tua, atau sumber lain;

- ✓ Mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Berdasarkan hasil kajian refleksi, selanjutnya guru memetakan berbagai kemungkinan munculnya masalah dan cara penanggulangannya;
- ✓ Menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan;
- ✓ Mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasi secara terus menerus sehingga terpecah masalah yang hadapi;
- ✓ Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui *grass roots*. Langkah ini sangat penting dilakukan sebagai bahan publikasi sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh orang lain yang pada gilirannya hasil pengembangan dapat tersebar.¹⁶⁶

¹⁶⁶.Wahyudin, *Menejemen Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014)h.49

BAB VII INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. Inovasi Pendidikan

Lahirnya inovasi berawal dari adanya permasalahan yang harus diatasi, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui inovasi atau pembaharuan. Inovasi merupakan hasil pemikiran yang original, kreatif, dan tidak konvensional. Penerapannya harus praktis dan di dalamnya terdapat unsur-unsur kenyamanan dan kemudahan. Beberapa ahli berpendapat bahwa semua inovasi adalah termasuk perubahan sosial, tetapi perubahan sosial belum tentu inovasi.

Inovasi merupakan perubahan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Dengan demikian, inovasi adalah bagian dari perubahan sosial.¹⁶⁷ Ellis (1997) menyatakan ada dua bentuk inovasi yaitu "*absolute innovation*" (inovasi mutlak) dan "*perceived innovation*" (inovasi yang dirasakan), *absolute innovation* lebih kepada kumpulan prinsip-prinsip yang benar-benar baru yang belum diuji dalam praktiknya, sedangkan *perceived innovation* menganut ide-ide atau praktik-praktik yang baru hanya untuk praktisi. Dan sebagian besar inovasi di bidang kita mungkin jatuh pada kategori "*perceived innovation*" (inovasi yang dirasakan).¹⁶⁸

¹⁶⁷. Ketut Gede Mudiarta, *Jaringan Sosial (Networks) Dalam Pengembangan Sistem Dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori Dan Dinamika Studi Kapital Sosial*, Forum Penelitian Agro Ekonomi 27 (1): 1. 2017.

¹⁶⁸. Ellis, R., *SLA research and language teaching*, Oxford; New York: Oxford University Press, 1997, hal. 26-27.

Inovasi pendidikan menjadi tujuan utama selain pembangunan, pengembangan serta pembaharuan pendidikan. Tujuan utama tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya sekaligus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang identik dengan berkembangnya ilmu teknologi. Pendidikan sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Dan diantara bagian penting tersebut adalah terkait pada kurikulum yang memang memiliki pengaruh yang cukup dominan.¹⁶⁹

Proses inovasi pendidikan mempunyai empat tahapan, di antaranya:¹⁷⁰

- 1) Invention (Penemuan)
- 2) Development (Pengembangan)
- 3) Diffusion (Penyebaran)
- 4) Adoption (Penyerapan).

Menurut *Rogers* menjelaskan bahwa dalam upaya perubahan seseorang untuk mengadopsi suatu perilaku yang baru terjadi berbagai tahapan pada orang tersebut, yakni:

- 1) Tahap awareness (kesadaran), yaitu tahap seseorang tahu dan sadar ada terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut.

¹⁶⁹. Siti Marfiah, "The Implementation of Policy Curriculum Based Culture in Senior High School 11 Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5 (7): 745, 2016.

¹⁷⁰. Muhammad Kristiawan, and Et.al, *Inovasi Pendidikan*. (Ponorogo: Wade Group, 2018), hal. 14-15

- 2) Tahap *interest* (keinginan), yaitu tahap seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut.
- 3) Tahap *evaluation* (evaluasi), yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi.
- 4) Tahap *trial* (mencoba), yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru.
- 5) Tahap *adoption* (adopsi), yaitu tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut.¹⁷¹

B. Pengertian Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam

Inovasi kurikulum lahir dari sebuah proses pembaruan kurikulum dan merupakan sistem dinamis dari elemen yang saling terkait, yang terdiri dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan sasaran, pelaksanaan serta evaluasi program¹⁷². Manfaat dari mengevaluasi dan merevisi kurikulum yang ada secara berkala diakui

¹⁷¹. Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa* 1st ed. (Jakarta: Grasindo, 2016), hal 32

¹⁷². Richards, Jack C, *Curriculum development in language teaching*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

secara luas¹⁷³ untuk memastikan bahwa kebutuhan peserta didik terpenuhi secara memadai.

Adapun yang dimaksud inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan, dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan.¹⁷⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud inovasi kurikulum pendidikan Islam adalah suatu ide, gagasan atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum pendidikan Islam dan pembelajaran yang dianggap baru serta mampu memecahkan masalah-masalah pendidikan Islam.

Fullan, (2001); Markee, (1997); Marsh,(2009); Rogers, (2003)¹⁷⁵ menyatakan bahwa inovasi kurikulum memiliki berbagai definisi, namun memiliki ciri-ciri yang sama.

¹⁷³.Jackson, J., *An Inter-university, Cross-disciplinary Analysis of Business Education: Perceptions of Business Faculty in Hong Kong*, English for Specific Purposes, 24 ,3, 293-306.

¹⁷⁴.Wina Sanjaya, *Inovasi Kurikulum Dan Pembelajaran: Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. 5th ed.(Jakarta: Prenada Media, 2015),hal 318.

¹⁷⁵.Fullan, M., *The new meaning of educational change* (3rd ed.). New York and London: Teachers College Press,2001. Markee, N. *Managing curricular innovation*,Cambridge: Cambridge University Press,1997. Marsh, C. J,*Key concepts for understanding curriculum* (4th ed.). London and New York: Routledge,2009. Rogers, E. M.,*Diffusion of Innovations*. New York, London: Free Press,2003. Ellis, R., *SLA research and language teaching*, Oxford; New York: Oxford University Press,1997

“Curriculum innovation is defined in various ways with the following characteristics in common: (1) targeted at enhancing students’ learning and development, and often managed in a planned manner; (2) enacted through the development and implementation of educational products that reflect new values and ideology; (3) involving possible changes in stakeholders’ beliefs and behaviors; and (4) enacted within a multi-dimensional socio-cultural system”.

Ciri-ciri inovasi kurikulum yaitu :

- 1) Ditargetkan pada peningkatan pembelajaran dan perkembangan siswa, dan dikelola secara terencana;
- 2) Merupakan pengembangan dan implementasi produk pendidikan yang mencerminkan nilai dan ideologi baru;
- 3) Terpengaruh dengan kemungkinan perubahan dalam keyakinan dan perilaku pemangku kepentingan;
- 4) diberlakukan dalam sistem sosial-budaya multi-dimensi

Dalam memahami inovasi kurikulum perlu memahami tiga pokok pemikiran, yaitu:¹⁷⁶

- a) rencana perubahan itu selalu baik,
- b) harus dipisahkan antara perubahan (*change*) dengan kemantapan (*stability*), dan
- c) apabila rencana perubahan sudah diadopsi maka perlu untuk dilakukan perbaikan/*improvement* terhadap perubahan tersebut.

¹⁷⁶.Cuban, I, Curriculum tability Ana Chage. Dalam *Handbook of Research on Curriculum* (New York: Macmillan Publishing Co.p, 1991),hal 216.

Perlunya sebuah inovasi kurikulum dalam lingkungan pendidikan di Indonesia tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Arifin, beberapa faktor yang menyebabkan inovasi kurikulum di Indonesia. Adalah :¹⁷⁷

- 1) Relevansi, yaitu masih adanya ketidaksesuaian antara kurikulum yang digunakan dengan kebutuhan di lapangan.
- 2) Mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah melalui beberapa indikator tertentu.
- 3) Masalah pemerataan pendidikan.
- 4) Masalah keefektifan dan efisiensi pendidikan.

Dalam melakukan inovasi kurikulum, lembaga pendidikan Islam dapat melakukan tahapan – tahapan dalam inovasi kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Islam yang meliputi:

- 1) Tahapan awal yaitu perumusan dimana lembaga pendidikan Islam mengenalkan konsep serta program-program kurikulum lembaga pendidikan sesuai visi-misinya;
- 2) Tahap Penyesuaian yaitu sebuah tahapan dimana semua program kurikulum yang sudah dirumuskan oleh lembaga pendidikan diimplementasikan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan;
- 3) Tahap penetapan dimana lembaga pendidikan melakukan penetapan terhadap keberlanjutan dari program-program kurikulum yang sudah diimplementasikan;

¹⁷⁷.Rusdiana, *Konsep Inovasi Pendidikan* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2014),hal 78

- 4) Tahap dukungan yaitu seluruh pihak berkolaborasi dengan seluruh unsur untuk melakukan tindakan sebagai bentuk dukungan terhadap program-program kurikulum;
- 5) Tahap evaluasi sebagai bentuk koreksi terhadap program-program kurikulum yang berjalan.

C. Proses Inovasi Kurikulum

1. Difusi Inovasi

Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat (anggota sistem sosial), dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi (hubungan timbal balik), antar beberapa individu baik secara memusat (konvergen) maupun memencar (divergen) yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi difusi merupakan komunikasi dimana pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru (inovasi). Munculnya teori difusi inovasi di mulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1930, ketika seorang Sosiolog Perancis *Gabriel Tarde*, memperkenalkan kurva difusi. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu.

Gambar 4. Kurva Difusi



Rogers¹⁷⁸ membedakan antara sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi desentralisasi. Dalam sistem difusi sentralisasi, penentuan tentang berbagai hal seperti: kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dan sebagainya, dilakukan oleh sekelompok kecil orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu. Sedangkan dalam sistem difusi desentralisasi, penentuan itu dilakukan oleh klien (warga masyarakat) bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Dalam pelaksanaan sistem difusi desentralisasi yang secara ekstrim tidak perlu ada agen pembaharu. Warga masyarakat itu sendiri yang bertanggungjawab terjadinya difusi inovasi.

Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi, yaitu:

- 1) Inovasi : suatu ide, barang, kejadian, metode

¹⁷⁸.Roger M & Shoemaker F. Floyd, *Communication of Innovation*, (New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc., 1971).

yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau diskoveri yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baru di sini diartikan mengandung ketidak tentuan (uncertainty), artinya sesuatu yang mengandung berbagai alternatif. Sesuatu yang tidak tentu masih terbuka berbagai kemungkinan bagi orang yang mengamati, baik mengenai arti, bentuk, manfaat, dan sebagainya. Dengan adanya informasi berarti mengurangi ketidak tentuan tersebut, karena dengan informasi itu berarti memperjelas arah pada satu alternatif tertentu.

- 2) Komunikasi dengan saluran tertentu, diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial, sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain.
- 3) Waktu, Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi; dan
- 4) Warga masyarakat (anggota sistem sosial) yaitu hubungan (interaksi antar individu atau orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat individu, kelompok-kelompok informal, organisasi, dan sub sistem yang lain.

2. Diseminasi Inovasi

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi.

Dalam mempelajari proses inovasi banyak para ahli

mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung serta perubahan apa yang terjadi dalam proses inovasi, maka hasilnya diketemukan pentahapan proses inovasi seperti berikut:

a) Proses Inovasi Yang berorientasi pada Individual

No	Ahli	Tahun	Tahapan Proses Inovasi
1.	Colley	1961	Belum menyadari-Menyadari-Memahami-Mempercayai - Mengambil tindakan
2.	Rogers	1962	- Menyadari - Menaruh perhatian - Menilai - Mencoba - Menerima (Adoption)
3.	Robertson	1971	- Persepsi tentang masalah - Menyadari - Memahami - Menyikapi - Mengesahkan - Mencoba - Menerima - Disonansi
4.	Klonglan & Coward	1970	Menyadari-Informasi-Evaluasi-(Menolak Simbolik)/ Menerima Simbolik- Mencoba-(Percobaan Ditolak)/ Percobaan Diterima-Menggunakan
5.	Rogers & Shoemakers	1971	Pengetahuan-Persuasi (Sikap)-Keputusan-Menerima/Menolak-Konfirmasi
6.	Zaltman & Brooker	1971	Persepsi- Memotivasi- Menyikapi-Legitimasi- Mencoba- Evaluasi-Menolak/ Menerima- Resolusi

b) Proses Inovasi Yang Berorientasi pada Organisasi

No	Ahli	Tahun	Tahapan Proses Inovasi
1.	Wilson	1966	- Konsepsi perubahan - Pengusulan perubahan - Adopsi dan Implementasi
2.	Shepard	1967	- Penemuan ide - Adopsi - Implementasi
3.	Hage & Aiken	1970	- Evaluasi - Inisiasi - Implementasi - Routinisasi
4.	Milo	1971	- Konseptualisasi - Tentatif adopsi - Penerimaan Sumber - Implementasi - Institusionalisasi
5.	Zaltman, Duncan & Holbek	1973	- Tahap Permulaan (Inisiasi) (1) Langkah pengetahuan dan kesadaran (2) Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi - Tahap Implementasi (1) Langkah awal implementasi (2) Langkah kelanjutan pembinaan

D. Proses Keputusan Inovasi

1. Pengertian Proses Keputusan Inovasi

Proses keputusan inovasi ialah sebuah proses yang dijalani oleh individu (unit pengambil keputusan), mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya.

2. Proses Keputusan Inovasi

Rogers membagi proses keputusan inovasi, menjadi lima tahap, yaitu:

- 1) Tahap pengetahuan (*knowledge*), di mana seseorang atau unit pengambil keputusan lain membuka diri terhadap adanya inovasi serta

ingin mengetahui bagaimana fungsi inovasi tersebut;

- 2) Tahap persuasi (*persuasion*), di mana seseorang atau unit pengambil keputusan lain mulai membentuk sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap inovasi;
- 3) Tahap keputusan (*decision*), di mana seseorang atau unit pengambil keputusan lain melakukan aktifitas yang mengarah kepada penetapan untuk memutuskan menerima atau menolak inovasi;
- 4) Tahap implementasi (*implementation*), di mana seseorang atau unit pengambil keputusan lain menerapkan atau menggunakan inovasi;
- 5) Tahap konfirmasi (*confirmation*), di mana seseorang atau unit pengambil keputusan lain mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang telah dibuatnya.

3. Tipe Keputusan Inovasi

Ada beberapa tipe keputusan inovasi, yaitu:

- a) Keputusan inovasi opsional, merupakan hasil keputusan individu untuk menerima atau menolak sebuah inovasi, tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b) Keputusan inovasi kolektif, merupakan hasil keputusan kelompok individu atau bersama-sama untuk menerima atau menolak sebuah inovasi.
- c) Keputusan inovasi otoritas, merupakan hasil keputusan yang ditentukan oleh individu atau sekelompok individu yang memiliki otoritas, wewenang, atau kedudukan yang lebih tinggi untuk menerima atau menolak sebuah inovasi.
- d) Keputusan inovasi kontingensi (*contingent*) yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi, baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manab. (2014). *Manajemen Perubahan Kurikulum*. Jogjakarta: Kalimedia.
- Abdullah Idi dan Toto Suharto. (2014). *Praktik Kurikulum Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rohman. (2015). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Semarang: CV. Karya abadi Jaya.
- Abuddin Nata. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ace Suryadi. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*. Bandung: Rosdakarya.
- Agus Zaenul Fitri. (2013). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Syar'i. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins. (1978). *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. New Jersey ; Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Arif Munandar. (2018). *Pengantar Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Beane, James A et all. (1986). *Curriculum Planning and Development*, Boston: Allyn and Bacon.
- Bukhari Umar. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Chatib Thaha. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Collin J.Marsh. (1997). *Planning,Management and Ideology: Key concepts for understanding curriculum*. London: Falmer Press.
- Cuban, I, *Curriculum tability Ana Chage*. Dalam *Handbook of Research on Curriculum*, New York: Macmillan Publishing Co, 1991.
- Dadang Suhardan dkk. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung; Alfabeta.

- Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bum Aksara.
- Dedi Lazwardi. Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* Vol . 7 No. 1, Juni 2017
- Dinn Wahyudin. (2014). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Djuwarijah,” Strategi Peningkatan Manajemen Kurikulum dalam pengembangan Mutu SDM Menuju Terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Berwawasan Internasional, h 205, *Jurnal El-Tarbawi Vol 1, No. 2, 2008*.
- Eisner E W. (2002). *The Education Imagination on the Design and Evaluation of School Program*. Ohio: Meril Prentice.
- Eko Putro Widoyoko. (2013). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ellis, R. (1997). *SLA research and language teaching*. Oxford; New York: Oxford University Press.
- E.Mulyasa. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- E.Mulyasa, (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Engkoswara dan A. Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Al-fabeta.
- Evelyn J Sowell. tt. *Curriculum An Integrative introduction*, Edisi III; New York: Pearso Education, Inc.
- Fathul Jannah, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 2, Desember 2013.
- Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change* (3rd ed.). New York and London: Teachers College Press.
- Hafni Ladjid. (2005). *pengembangan kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- H.A.R Tilaar, (2014). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta:RinekaCipta.

- Hasan Asari. (1994). *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-Lembaga Pendidikan*. Bandung: Mizan.
- Hasan Baharun. (2017). *Pengembangan Kurikulum : Teori Dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Hasan Langgulung. (1980). *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hermino, Agustinus. (2014). *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter*. Bandung: Alfabeta.
- Husaini Usman. (2010). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim Nasbi, *Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis*, dalam *Jurnal Idaarah*, Vol I, No.2, Desember 2017, h 324
- Istiningsih dan Wiji Hidayati, "*The Correlation Of Students' Character With Scientific Learning Skill (Study On Basic School In Indonesia)*," dalam *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)* Volume 5, Issue 3 Ver. III (May - Jun. 2015), h. 31
- Jackson, J. (2005). *An Inter-university, Cross-disciplinary Analysis of Business Education: Perceptions of Business Faculty in Hong Kong. English for Specific Purposes*, 24 ,3, 293-306.
- Kamisa. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Kartika: Surabaya.
- Katz, R. L. (1955). *Skills of an effective administrator*. Harvard Business Review,).
- Kristiawan, Muhammad, and Et.al. 2018. *Inovasi Pendidikan*. Wade Group. 1st ed. Ponorogo: Wade Group.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Press.

- Made Pidarta. (1988). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Marfuah, Siti. 2016. "The Implementation of Policy Curriculum Based Culture in Senior High School 11 Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 5 (7): 743–52.
- Markee, N. (1997). *Managing curricular innovation*. Cambridge: Cambridge University Press
- Marni Serepinah, "Kebermaknaan Evaluasi Program Pendidikan", dalam *Jurnal Pendidikan Penabur* edisi no. 20, Vol. XII, 2013.
- Marno dan Triyo Supriyanto. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Malang: Refika Aditama.
- Marsh, C. J. (2009). *Key concepts for understanding curriculum* (4th ed.). London and New York: Routledge
- Martini Jamaris. (2013). *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mudiarta, Ketut Gede. 2017. "Jaringan Sosial (Networks) Dalam Pengembangan Sistem Dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori Dan Dinamika Studi Kapital Sosial." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 27 (1): 1. <https://doi.org/10.21082/fae.v27n1.2009.1-12>.
- Muhammad Ansyar. (2015). *Kurikulum, Fondasi, Desain, dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Azhari: *Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, dalam *Jurnal Analytica Islamica*: Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2017
- Muhammad Zain. (2009). *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Teras.
- Mujamil Qomar. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam)*. Malang: Erlangga.

- Mulyasa. (2006). Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). Kurikulum dan Pembelajaran dalam Muhammad Ali, dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2013). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Ngalim Purwanto. (1998). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Northouse, P. (2007). Leadership theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Oemar Hamalik. (2006). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oemar Hamalik. (2008). Manajemen Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Oemar Hamalik. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Oliva, P. F. (1992). Developing the Curriculum. Amerika: Harpers Collin Publisher.
- Omar Mohammad At-toumy. (1979). Falsafah Pendidikan Islam. Jakarta : Bulan Bintang.
- Parkey F W. (2006). Curriculum Planning a Contemporary Approach. New York: Person.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II, Pasal 2 ayat (1).
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design* . Sydney: National library of Australia cataloging in-publication entry.
- Ralph W. Tyler. (1957). Curriculum: Then and Now. in Proceedings of the 1956 Invitational Conference on Testing Problems :Princeton, N.J.: Educational Testing Service.
- Ramayulis dan Samsul Nizar. (2010). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

- Rena Lestari. (2006). *Siklus Manajemen Yogyakarta*:Deepublis.
- Richards, Jack C. (2001). *Curriculum development in language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richard L Arends. (2004). *Learning to Teach*. New York: McGraw Hill.
- Richard L Daft. (2008). *New Era of Management*, New Jersey: South Western.
- Richard L. Daft. (2010). *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Romli, Khomsahrial. 2016. *Komunikasi Massa*. 1st ed. Jakarta: Grasindo.
- Roger M & Shoemaker F. Floyd. (1971). *Communication of Innovation*. New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. New York, London: Free Press.
- Rusdiana, A. 2014. *Konsep Inovasi Pendidikan*. 1st ed. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salinan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Bo 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
- Salinan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Inovasi Kurikulum Dan Pembelajaran: Teori Dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. 5th ed. Jakarta: Prenada Media.
- Sayyid Saabiq. (1981). *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*. Jakarta: Intermasa.
- Sharles Stanton. (1990). *Higher learning in Islam: The Classical Period. AD 700-1300*. Maryland: Rowman & Littlefield.

- Sholeh Hidayat. (2015). Pengembangan Kurikulum Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- S. Nasution. (2006). Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
- S.Nasution. Kurikulum dan Pengajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. (1992). Fungsi-Fungsi Manajerial . Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- S.Shimatul Ula. (2013). Manajemen Pendidikan Efektif. Jogjakarta: Berlian.
- St. Vembriarto. (1993). *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono, Upaya Manajerial Pengembangan Kurikulum Program Unggulan di Madrasah Aliyah,dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam,volume 4 Nomor 1, Mei 2016.
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*.
- Sukardi. (2014). Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukiman. (2015). Pengembangan Kurikulum. (Bandung: Rosda Karya.
- Sulistiyorini. (2006). Manajemen Pendidikan Islam. Surabaya: Elkaf.
- Susan Albers Mohrman, et.al. (1994). School Based Management: Organizing for High Performance. San Francisco: Mc Gill Publishing.
- Syafaruddin dan Amiruddin. (2017). Manajemen Kurikulum. Medan: Perdana Publishing.
- Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan: Teknologi dan Kejuruan*. Bandung: Adytama.
- Teguh Triwijiyanto. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tommy Wallis and Teressa Voltz. (2015). *Curriculum Management Plan*. North Texas Avenue: Bryan Independent School District.

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, No. 19.
- U.Saefullah. (2012). Manajemen Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Vedung. (2014). Public Policy and Program Evaluation.
- Wahyu Bagja Sulfemi. (2018). Manajemen Kurikulum di Sekolah. Bogor: Visi Nusantara Maju.
- Wiji Hidayati. (2012). Pengembangan kurikulum. Yogyakarta: Pedagogia.
- Wiji Hidayati, "Implementation of Curriculum 201 in Primary School Sleman Yogyakarta" dalam IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME) Volume 6, Issue 2 Ver. II (Mar. - Apr. 2016), hlm. 8.
- Wina Sanjaya. (2009). Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktek KTSP. Jakarta: Kencana.
- Wirawan. (2011). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zainal Arifin, "Evaluasi Program: Model-Model Evaluasi" , *Makalah*, UPI tahun 2010.
- Zainal Arifin. (2011). Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zainal Arifin. (2012). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Zainal Arifin. (2012). *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Zakiah Dradjat. (2000). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Nasir, M.Ag. Lahir di Sanrangeng Wajo, 31 Desember 1970. Alumni Ponpes As'adiyah Sengkang Wajo Sulawesi Selatan. Menyelesaikan S-1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. S-2 ditempuh di kampus yang sama dalam bidang Studi Islam. Melanjutkan S-3 dalam

bidang Pengembangan Kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Saat ini diamanahi menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Samarinda. Selain itu aktif sebagai assessor Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah Provinsi Kalimantan Timur (BAN S/M) serta sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah dan keagamaan. Beberapa hasil karyanya dalam bentuk artikel ilmiah yaitu; *Pengembangan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan islam di madrasah*, *Profesionalisme Guru Agama Islam: Sebuah Upaya Peningkatan Mutu Melalui LPTK Tahun 2013*, *Kurikulum madrasah: Studi perbandingan madrasah di Asia Tahun 2015*, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah Tahun 2009*, *Mahasiswa Islam dalam Perspektif Pendidikan Global Tahun 2012*, *Curriculum Development and Accreditation Standards in the Traditional Islamic Schools in Indonesia*, *Curriculum Characteristics of Madrasah Aliyah in East Kalimantan*, *The Influence of Advance Organizer and the Different Cognitive Styles of Higher Education Students Tahun 2020*.



Muhammad Khairul Rijal, M.Pd.

Lahir di Balikpapan 09 September 1988. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda. Diantara karyanya yang diterbitkan “Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Kota Balikpapan” dan “Tindakan Preventif Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Eksistensi Paham Radikal Di Sekolah “ Tahun 2018, “ *Efektifitas dan Efisiensi*

Pemberdayaan TNI Sebagai Guru di Daerah 3 T” Tahun 2019, “ *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ayat Seruan (Wahai Manusia) di Dalam Al-Qur’an*”,Buku Antologi “Menyemai Renjana Memendar Senjana”:Ungkapan Perasaan dan Doa Guru Semasa Corona, Buku Antologi “Mudita Lega: Antologi 1234 Pantun Lebaran” Tahun 2020. Buku Antologi “Extraordinary Literasi Pendidikan” Tahun 2020, Buku Antologi “ Aku Bangga Menjadi Dosen” Tahun 2020, artikel ilmiah dengan judul Transformational or Transactional Leadership Style: Which Affects Work Satisfaction and Performance of Islamic University Lecturers During COVID-19 Pandemic Tahun 2020, dan artikel ilmiah” Model Kurikulum dan Pembelajaran Pesantren Kampus PTKI di Indonesia” Tahun 2020.

